

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT  
LOKAL DALAM PENGEMBANGAN  
PARIWISATA DI PULAUGILI LABAK  
KABUPATEN SUMENEP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DESY MELANIA DWI ANITA  
NIM. 145030801111003**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PARIWISATA  
MALANG  
2018**

## MOTTO

*“Keberhasilan terbesar kita bukanlah karena kita tidak pernah gagal, tetapi bagaimana cara kita untuk terus bangkit pada setiap kali kita mengalami kegagalan”*

(Desy Melania Dwi Anita)



### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep

Disusun oleh : Desy Melania Dwi Anita

NIM : 145030801111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Pariwisata

Konsentrasi/Minat : Perhotelan

Malang, 16 Mei 2018

Komisi Pembimbing



**Supriano, S.Sos., M.AB**  
NIP. 20110784 0427 1 001

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, pada:

- Hari : Rabu
- Tanggal : 06 Juni 2018
- Jam : 08.00 – 09.30 WIB
- Skripsi atas nama : Desy Melania Dwi Anita
- Judul : Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep

dan dinyatakan,

**LULUS**

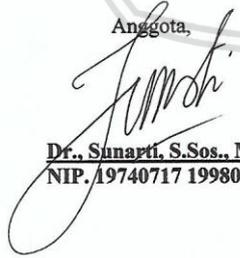
**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,



**Supriono, S.Sos., M.AB**  
**NIP. 20110784 0427 1 001**

Anggota,



**Dr., Sunarti, S.Sos., M.AB**  
**NIP. 19740717 199802 2 001**

Anggota,



**Edriana Pangestuti, S.E., M.Si., D.B.A**  
**NIP. 19770321 200112 2 001**



### PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 16 Mei 2018



Nama : Desy Melania Dwi Anita  
NIM : 145030801111003

## RINGKASAN

Desy Melania Dwi Anita, 2018, **Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep**. Supriono, S.Sos., M.AB.

Pulau Gili Labak merupakan salah satu pulau kecil yang berada di kawasan Kabupaten Sumenep, Madura yang saat ini telah adanya pengembangan untuk dijadikan sebagai objek daerah tujuan wisata yang menawarkan wisata bahari. Pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak juga diharapkan mampu melibatkan dan mencakup masyarakat lokal secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi atau berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan. Adanya partisipasi dari masyarakat lokal juga diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mensukseskan atau mewujudkan pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak terkait masyarakat adalah tuan rumah atas objek yang dimiliki.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan memiliki dua rumusan masalah yaitu, (1) Bagaimanakah partisipasi masyarakat lokal dalam berkontribusi untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep? (2) Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep?. Sumber data diperoleh dari informan, observasi, dokumen, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Bentuk partisipasi masyarakat yaitu, (1) Partisipasi Aktif yang memberikan fasilitas pendukung dan melakukan pemeliharaan potensi dan objek wisata dalam pengembangan pariwisata untuk kebutuhan wisatawan (warung makanan dan minuman, toilet, mushollah, dan penginapan). (2) Partisipasi Pasif yang hanya saja mengikuti apa yang diperintahkan oleh pihak atasan (dalam hal ini Disbudparpora dan Pokdarwis). Masyarakat lokal disini juga masih cenderung bertumpu pada kelompok yaitu Pokdarwis di Pulau Gili Labak. Faktor penghambat yaitu faktor usia, kurangnya pengalaman dan rendahnya pengetahuan masyarakat yang sangat awam (rendahnya kesadaran diri atau motivasi diri), serta kurangnya sosialisasi dan dukungan dari Kepala Desa. Faktor pendorong yaitu adanya kepedulian, motivasi, dan beberapa motif dari masyarakat.

Berdasarkan uraian, peneliti memberikan rekomendasi yaitu pengoptimalan bidang kerja di Pokdarwis, memberikan sosialisasi keberlanjutan dari pihak terkait, membuat program-program pengembangan, serta peningkatan motivasi dari diri masyarakat lokal.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat lokal, pengembangan pariwisata, dan Pulau Gili Labak



## SUMMARY

Desy Melania Dwi Anita, 2018, **Analysis of Local Community Participation in Tourism Development at Gili Labak Island of Sumenep Regency**. Supriono, S.Sos., M.AB.

Gili Labak Island is one of the small islands located in the region Sumenep, Madura which currently has the development to serve as an object tourist destination that offers marine tourism. Tourism development in Gili Labak Island is also expected to involve and cover the local community as a whole to contribute or actively participate in the development process. The participation of local communities is also expected to contribute to the success or realization of tourism development in Gili Labak Island related to the community is the host of the object owned.

This research used descriptive research type with qualitative approach and has two problem's that is, (1) How is the participation of local community in contributing to support tourism development in Gili Labak Island of Sumenep Regency? (2) What are the constraining factors and factors driving local communities to support tourism development in Gili Labak Island of Sumenep Regency ?. Source of data was obtained from informants, observation, document, and documentation. Data analysis used four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

Forms of community participation are: (1) Active Participation which provides supporting facilities and cares for potential and tourism objects in tourism development for the needs of tourists (food and drink stalls, toilets, mushollah, and lodging). (2) Passive Participation that only follows what is ordered by the superior (in this case Disbudparpora and Pokdarwis). Local people here also still tend to rely on the group which is Pokdarwis on Gili Labak Island. The obstacle factors were age factor, lack of experience and low knowledge of people who are very layman (low self-awareness or self-motivation), and lack of socialization and support from the Village Head. The driving factors were the awareness, motivation, and some motives of the community.

Based on the description, the researcher has given recommendation that is optimization of work field in Pokdarwis, giving socialization of sustainability from related parties, making development programs, and increasing the motivation from self of local community.

**Keywords:** Local community participation, tourism development, and Gili Labak Island

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan anugerah luar biasa yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep”**. Penulisan laporan skripsi ini merupakan laporan akhir yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi sehingga peneliti dapat meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang membantu secara moril, materil, diskusi, saran, dan masukan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang berkat anugerah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Djoko Mulio dan Ibu Ninik Yuliani yang selalu memberikan semangat, dukungan memenuhi kebutuhan, dan doa dalam suka maupun duka.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Ibu Dr. Sunarti, S.Sos., MAB selaku Ketua Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Supriono, S.Sos.,M.AB selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan waktu, petunjuk, arahan, dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengetahuan terkait kepariwisataan.
8. Bapak Ahmad Hidayat, ST, MM selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang telah bersedia menjadi narasumber terkait partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.
9. Bapak Nasah Bandy, SE. KP, M.Si selaku Camat Talango Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang telah bersedia menjadi narasumber terkait partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.
10. Bapak Abdul Jalil selaku Ketua RT Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang telah bersedia menjadi narasumber terkait partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.
11. Bapak Arwiyanto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang telah bersedia menjadi narasumber terkait partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.
12. Bapak Warno selaku Wakil Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang telah bersedia menjadi narasumber terkait partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.



13. Kakak tercinta Maria Eka Wahyuni dan adik tercinta Yunita Evelyn Tri Puspa Dewi yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta doa baik dalam suka maupun duka.
14. Cimori sebagai sahabat-sahabat seperjuangan 7 semester yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat dalam suka maupun duka untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Ega Sekarnusa Perwari sebagai sahabat seperjuangan di Watugong 15 yang selalu menemani untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
16. Yonathan Sutawijaya yang selalu membantu, mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman Pariwisata angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi keluarga selama perkuliahan serta kenangan yang kalian berikan.
18. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung dan memberikan motivasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikian laporan skripsi ini penulis buat, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan kesempurnaan laporan skripsi. Semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang,

Penulis

## DAFTAR ISI

Judul	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kontribusi Penelitian .....	12
E. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Tinjaua Empiris .....	16
B. Tinjauan Teoritis.....	26
1. Pariwisata .....	26
a. Definisi Pariwisata .....	26
b. Jenis-jenis Wisata.....	28
c. Definisi Wisatawan .....	31
d. Pengembangan Destinasi Pariwisata .....	34
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata .....	39
a. Definisi Partisipasi Masyarakat .....	39
b. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata .....	42
c. Dampak Pengembangan Pariwisata .....	45
d. Respon Masyarakat terhadap Dampak Pengembangan Pariwisata .....	48
e. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.....	50
f. Kerangka Berpikir .....	54
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Jenis Penelitian .....	55



B. Fokus Penelitian .....	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	57
D. Sumber Data .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Teknik <i>Sampling</i> .....	64
G. Instrumen Penelitian .....	66
H. Analisis Data .....	67
I. Keabsahan Data .....	68

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	70
B. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	80
1. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak .....	83
a. Tahap Perencanaan .....	88
b. Tahap Implementasi .....	91
c. Tahap <i>Monitoring</i> dan Evaluasi .....	95
d. Bentuk Partisipasi Aktif .....	98
e. Bentuk Partisipasi Pasif .....	106
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Masyarakat Lokal untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak .....	109
a. Faktor Penghambat .....	110
b. Faktor Pendorong .....	112
C. Analisis dan Interpretasi .....	115
1. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak .....	115
a. Tahap Perencanaan .....	116
b. Tahap Implementasi .....	118
c. Tahap <i>Monitoring</i> dan Evaluasi .....	119
d. Bentuk Partisipasi Aktif .....	121
e. Bentuk Partisipasi Pasif .....	123
2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Masyarakat Lokal untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak .....	124
a. Faktor Penghambat .....	124
b. Faktor Pendorong .....	127

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	137

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>141</b>
-----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN**



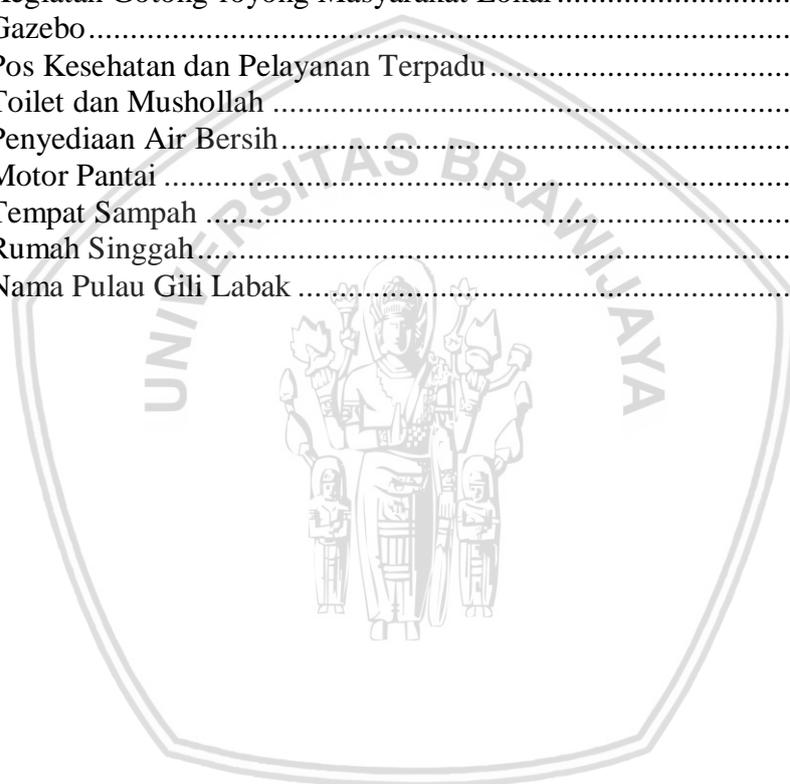
**DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumenep.....	5
2.1	Penelitian Terdahulu .....	22
2.2	Urutan Pentingnya Sifat Destinasi menurut Wisatawan .....	35
2.3	Siklus Hidup Destinasi .....	37
4.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Pulau Gili Labak.....	79



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir .....	55
4.1	Peta Kawasan Pengembangan Destinasi di Kabupaten Sumenep.....	76
4.2	Peta Jalur menuju Pulau Gili Labak.....	78
4.3	Buah Kelapa untuk Disetor ke Warung.....	96
4.4	Kegiatan Gotong-royong Masyarakat Lokal .....	100
4.5	Gazebo.....	100
4.6	Pos Kesehatan dan Pelayanan Terpadu.....	101
4.7	Toilet dan Mushollah .....	103
4.8	Penyediaan Air Bersih.....	103
4.9	Motor Pantai .....	103
4.10	Tempat Sampah .....	105
4.11	Rumah Singgah.....	105
4.12	Nama Pulau Gili Labak .....	106



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Jumlah Halaman
1	Dokumentasi .....	6
2	Pedoman Wawancara .....	11
3	Daftar Nama Masyarakat Lokal Pulau Gili Labak.....	2
4	Surat Keterangan .....	4
5	<i>Curriculum Vitae</i> .....	2



## CURRICULUM VITAE

---

---



### I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Desy Melania Dwi Anita

Tempat Tanggal Lahir : Sapudi, 06 Desember 1995

Alamat Asal : JL. Raya Desa Pancor Dusun Wa' Duwak  
Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep  
Pulau Sapudi, Madura

Domisili : Malang

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Status : Belum menikah

Tinggi/ Berat Badan : 158 Cm/ 53 Kg

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Prodi : Pariwisata (konsentrasi perhotelan)

No HP/Telepon : 085230763769

Email : [desymelania06@gmail.com](mailto:desymelania06@gmail.com)

## II. RIWAYAT PENDIDIKAN

### • Pendidikan Formal

1. SD Negeri Pancor 1, Pulau Sapudi, Madura (2008).
2. SMP Negeri 1 Gayam, Pulau Sapudi, Madura (2011).
3. SMA Negeri 2 Sumenep, Kota Sumenep, Madura (2014).
4. S1 Bisnis Pariwisata Universitas Brawijaya, Malang (aktif).

## III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris pelaksana BATARA (Lomba Pariwisata Nusantara) di acara *Tourism Week* Program Kerja dari Himpunan Mahasiswa Pariwisata, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang (2017).
2. Staff Department PSDM Himpunan Mahasiswa Pariwisata, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang (2017).
3. Staff acara Malam Keakraban Mahasiswa Pariwisata, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang (2015).
4. Staff HUMAS Bakti Sosial Himpunan Mahasiswa Pariwisata, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang (2015).

## IV. KURSUS DAN SEMINAR

1. Peserta Table Manner di Universitas Merdeka, Malang (2015).
2. Seminar “Young Entrepreneur Show” di Universitas Brawijaya, Malang (2014).

## V. KELEBIHAN

1. Memiliki kedisiplinan dalam hal ketepatan waktu (*on time*).
2. Dapat dipercaya dan bertanggung jawab pada setiap tugas yang diberikan.
3. Berpenampilan menarik, memiliki kesopanan dan keramahan dalam hal interaksi dan berkomunikasi secara formal.
4. Mampu mengelola keuangan dengan baik.
5. Menyukai kerapian dan kebersihan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu industri yang dapat berperan sebagai lokomotif (penggerak) bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Pariwisata dikatakan sebagai suatu industri, hal ini dikarenakan adanya sekelompok perusahaan yang khususnya bergerak di bidang jasa (produk) yang memberikan pelayanan kepada konsumen (wisatawan). Selain itu, istilah industri pariwisata pada dasarnya juga digunakan untuk meyakinkan orang-orang bahwa, adanya pariwisata akan memberikan dampak positif bagi perekonomian suatu negara atau daerah tertentu, khususnya pada dampak *multiplier effect* yang ditimbulkannya (Yoeti, 2008:61-67). Industri pariwisata juga disebut sebagai kegiatan yang memiliki kemampuan sangat besar dalam menciptakan dampak ekonomi yang sifatnya *multiplier effect* (multi ganda) bagi daerah dan masyarakat yang terkait. *Multiplier effect* (multi ganda) dapat diartikan bahwa, industri pariwisata menjadi salah satu instrumen (alat) untuk menggerakkan sektor-sektor usaha dan kegiatan yang terkait pengembangan dan pemerataan wilayah serta pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di wilayah yang terpencil atau di perdesaan untuk menanggulangi kemiskinan (Sunaryo, 2013:35-37).

Pada saat ini, telah banyak negara maju hingga negara berkembang termasuk Indonesia yang menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor industri yang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak.



Hal ini dikarenakan, pariwisata dinilai sebagai salah satu sektor yang cukup memberikan sumbangan pada devisa negara, selain dari sektor minyak bumi dan gas. Adanya industri pariwisata juga mampu berperan sebagai alternatif untuk perluasan lapangan kerja, mendorong dan pemeratakan pembangunan daerah, serta membantu dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Pitana, 2009:32). Selain itu, ada pula yang menjadi alasan utama suatu daerah tertentu melakukan pengembangan pariwisata, hal ini sangat dikaitkan dengan pembangunan perekonomian suatu daerah tertentu, atau dengan kata lain bahwa, adanya pengembangan pariwisata pada suatu daerah tertentu akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak (Yoeti, 1997:33).

Hal penting yang menjadi dasar utama pada saat mengembangkan pariwisata adalah harus memiliki sebuah potensi wisata yang nantinya dapat dikembangkan menjadi sebuah objek tujuan wisata. Selain tersedianya potensi wisata yang dapat dikembangkan, hal penunjang lainnya yang juga dibutuhkan adalah tersediannya sarana, prasarana, dan infrastruktur yang didukung oleh adanya peran dari *stakeholders* pariwisata dalam mengembangkan pariwisata. Peran dari *stakeholders* pariwisata salah satunya yaitu, dikaitkan dengan dukungan atau partisipasi dari masyarakat lokal khususnya untuk mengembangkan objek wisata yang menarik, menciptakan suasana di daerah objek wisata yang menyenangkan, dan nantinya mampu memelihara objek wisata yang berkelanjutan (sumenepkab.go.id, 2018).

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu tindakan yang berupa adanya keikutsertaan dari masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan mengenai alternatif solusi dalam menghadapi serta menangani masalah (*problem solving*), dan keterlibatan masyarakat untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi (Adi, 2007:27). Selain itu, partisipasi masyarakat lokal juga merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk mengaktualisasi dari kesediaan, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penyusunan, dan implementasi suatu program pengembangan pariwisata yang dilaksanakan (Adisasmita, 2006:34). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, adanya partisipasi atau dukungan dari masyarakat lokal dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan, masyarakat merupakan tuan rumah atas objek wisata yang dikembangkan di daerahnya (Jamal, 1995:188).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa:

“Adanya pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan terhadap kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global”.

Pengembangan pariwisata juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dari adanya aktivitas pariwisata di daerahnya. Partisipasi masyarakat lokal merupakan salah satu hal yang penting untuk memastikan pembangunan kepariwisataan dapat terwujud, karena adanya partisipasi masyarakat lokal merupakan hal yang berdampak langsung pada

pengembangan pariwisata (Easterling dalam Sinclair, 2017:5). Masyarakat juga merupakan pemangku kepentingan, sehingga tanpa adanya dukungan dari masyarakat, pengembangan pariwisata tidak akan berkelanjutan secara maksimal (Byrd, 2007:7).

Dukungan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata, sering kali berkaitan pada persepsi masyarakat tentang dampak positif dan dampak negatif dari adanya kegiatan pariwisata (Telfer dalam Rasoolimanesh, 2017:149). Apabila masyarakat lokal mampu memiliki persepsi tentang dampak positif dari kegiatan pariwisata, maka tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan mendorong untuk mendukung pengembangan pariwisata. Sedangkan, apabila masyarakat lebih berpikir atau memiliki persepsi dampak negatif pada kegiatan pariwisata, maka hal ini akan membuat masyarakat menjauh bahkan bersikap acuh tak acuh untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerahnya (Sharpley, 2014:37). Persepsi masyarakat lokal tentang dampak positif atau dampak negatif pada pengembangan pariwisata, nantinya juga akan berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Nicholas *et al.*, dalam Rasoolimanesh, 2017:149).

Pengembangan pariwisata saat ini tidak hanya terjadi pada kota-kota atau kabupaten-kabupaten yang maju dan cukup terkenal. Namun, hal ini juga terjadi di Kabupaten Sumenep yang merupakan sebagai salah satu kabupaten yang terletak di ujung bagian timur Pulau kecil Madura di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep saat ini juga tidak mau kalah dengan daerah-

daerah lainnya dalam mengembangkan pariwisata yang didukung dengan adanya potensi-potensi wisata yang saat ini sedang dikelola dan diperkenalkan ke daerah luar Madura. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep dapat dibuktikan dengan adanya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumenep yang saat ini berhasil menduduki di peringkat ke-5 dari 38 Kabupaten atau Kota di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Banyuwangi (seputarmadura.com, 2017).

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tentang kunjungan wisatawan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumenep Periode Tahun 2013-2017**

No	Tahun	Wisatawan Nusantara (Orang)	Wisatawan Mancanegara (Orang)	Total Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)
1	2013	851.756	143	851.899
2	2014	544.245	378	544.623
3	2015	626.926	417	627.343
4	2016	854.614	1.332	855.946
5	2017	1.047.109	4.036	1.051.145

*Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, 2018*

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumenep untuk periode tahun 2013-2017 cukup berpotensi untuk lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya. Mewujudkan hal tersebut pastinya tidak mudah, sehingga dibutuhkan tindakan (*action*) yang lebih kompleks dari berbagai pemangku kepentingan atau pihak yang terkait dalam

hal mengelola potensi pariwisata yang ada, dalam rangka mewujudkan pengembangan pariwisata yang lebih baik di Kabupaten Sumenep untuk menarik minat jumlah kunjungan wisatawan. Pada saat ini, pihak-pihak yang berkaitan dengan hal pengembangan pariwisata perlahan telah mengambil tindakan. Salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep yang mencetuskan tema “*Visit Sumenep 2018*”. Adanya program ini diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan dan sekaligus mewujudkan proses pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan suatu sistem tata kelola pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata, dengan tetap menjaga lingkungan dan sekaligus meningkatkan kesempatan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.

Program “*Visit Sumenep 2018*” saat ini benar-benar disiapkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya inisiatif dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang terus melakukan pembenahan pada infrastruktur, sarana dan prasarana di lokasi wisata maupun akses menuju lokasi wisata, dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di beberapa lokasi wisata. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga membuat kalender *event* “*Visit Sumenep 2018*” dengan menawarkan berbagai macam kegiatan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Sumenep (newsmadura.com, 2017). Pada program ini, dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep juga telah melakukan pemetaan terhadap beberapa lokasi

wisata yang ada di Kabupaten Sumenep. Salah satunya di Pulau Gili Labak, yang merupakan sebagai salah satu diantara 3 destinasi unggulan di Kabupaten Sumenep yang dijadikan sebagai wisata andalan dalam program “*Visit Sumenep 2018*” (newsmadura.com, 2017).

Pulau Gili Labak atau yang lebih dikenal dengan Wisata Gili Labak merupakan salah satu jenis wisata bahari yang terletak di sebuah pulau kecil Madura. Pulau Gili Labak saat ini sudah mulai dikembangkan di Kabupaten Sumenep karena adanya potensi pertumbuhan terumbu karang yang cukup baik. Pada awal proses pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak hingga saat ini menjadi objek daerah tujuan wisata yang cukup menarik, membutuhkan usaha keras dari banyak pihak (portalmadura.com, 2017).

Berdasarkan hasil observasi penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa, awalnya Pulau Gili Labak ini hanya merupakan sebuah pulau kecil yang dulunya hanya dikenal dengan sebutan nama pulau tikus, karena dulunya pulau ini menjadi tempat sarang tikus yang hingga saat ini masih menjadi cerita mistis di pulau tersebut. Selain itu, yang menjadikan sulitnya pengembangan pariwisata dilakukan di Pulau Gili Labak dikarenakan keberadaannya yang terpencil dan cukup sulit untuk dijangkau, minimnya sarana, prasarana dan infrastruktur untuk mendukung adanya kegiatan pariwisata, minimnya pengetahuan atau hampir kebanyakan dari masyarakatnya yang masih awam tentang pariwisata, serta kurangnya dukungan secara totalitas dari tokoh masyarakat (dalam hal ini adalah Kepala Desa) selaku orang yang berkewajiban untuk memimpin dan mengatur

masyarakat setempat. Permasalahan lain yang muncul dikarenakan, masyarakat lokal di Pulau Gili Labak yang kurang memiliki motivasi diri (keinginan dari diri sendiri) untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dan juga munculnya berbagai gesekan atau masalah yang ditimbulkan di lingkungan masyarakat dengan beberapa pihak (Disbudparpora dan Pemkab) terkait hak kepemilikan tanah atau lahan yang akan digunakan untuk melakukan pengembangan.

Berdasarkan hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menimbulkan minimnya partisipasi aktif dari masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata. Sehingga sampai saat ini pariwisata di Pulau Gili Labak dapat disebutkan bahwa secara keseluruhan belum mampu dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal oleh pihak terkait. Namun, dengan adanya potensi di Pulau Gili Labak yang memiliki keindahan alam dan keindahan bawah laut berupa terumbu karang, akhirnya para *stakeholders* pariwisata terus berinisiatif untuk saling bekerjasama dalam mengembangkan Pulau Gili Labak menjadi suatu objek daerah tujuan wisata yang nantinya dapat lebih diminati oleh para wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Permasalahan yang terjadi di Pulau Gili Labak perlu diperhatikan lagi oleh seluruh pihak yang terkait dalam pengembangannya. Pihak tersebut adalah pemerintah, Disbudparpora, dan khususnya seluruh lapisan masyarakat di Pulau Gili Labak. Pulau Gili Labak cukup memiliki potensi yang layak untuk lebih dikembangkan menjadi objek daerah tujuan wisata yang lebih baik lagi

dalam hal atraksi wisata maupun dalam hal pelayanannya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus masyarakat setempat. Selain itu, pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak jauh lebih berkembang jika dibandingkan dengan Pantai Sembilan yang juga merupakan salah satu wisata baru di Kabupaten Sumenep yang saat ini juga dalam proses pengembangan dan juga menjadi salah satu dari 3 wisata unggulan di Kabupaten Sumenep yang masuk dalam program “*Visit Sumenep 2018*”.

Berdasarkan dari data pengunjung daya tarik wisata di Kabupaten Sumenep Jawa Timur yang dicatat oleh Disbudparpora Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Sembilan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Pulau Gili Labak. Jika dilihat berdasarkan data tersebut, Pantai Sembilan mulai menjadi objek daerah tujuan wisata secara resmi pada tahun 2017 dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 464 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 75.311 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa adanya selisih yang cukup banyak dengan Pulau Gili Labak yang sudah mulai resmi menjadi objek daerah tujuan wisata sejak tahun 2016 dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 33.419 orang dan wisatawan mancanegara 300 orang. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 30.683 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 406 orang. Jumlah kunjungan wisatawan yang ada cukup membuktikan bahwa Pantai Sembilan lebih diminati oleh wisatawan (dalam hal pelayanan dan pemenuhan kebutuhan wisatawan), karena dalam jangka 1 (satu) tahun sudah mencapai total

kunjungan 75.775 orang, sedangkan Pulau Gili Labak dalam jangka 2 (dua) tahun mencapai total kunjungan 64.808 orang.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, peran atau partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak pada awal pengembangan pariwisata bahkan hingga saat inipun masih sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan pemeliharaan dan penjagaan pada destinasi di Pulau Gili Labak. Peran atau partisipasi masyarakat nantinya diharapkan dapat menentukan pengembangan pariwisata yang dapat berkelanjutan sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah dalam melakukan pengembangan objek wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumenep. Masyarakat lokal juga diharapkan mampu memberikan partisipasi yang aktif untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak yang nantinya dapat mendongkrak kondisi perekonomian masyarakat setempat melalui beberapa lowongan pekerjaan yang dibutuhkan dari kegiatan pariwisata yang dilakukan didaerahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu analisis yang lebih dalam lagi tentang partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak yang nantinya dapat diketahui tentang peran atau partisipasi apa saja yang telah masyarakat lokal kontribusikan di Pulau Gili Labak dalam pengembangan pariwisata hingga saat ini, dan sekaligus nantinya juga dapat diketahui tentang kesiapan dari masyarakat lokal untuk menerima dengan baik wisatawan yang berkunjung ke Pulau Gili Labak. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “**Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.**”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang serta fenomena di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.

#### D. Kontribusi Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
  - a. Sebagai sarana bagi mahasiswa di bidang pariwisata dalam menuangkan gagasan, ide, pemikiran, pengetahuan serta pengalaman yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.
  - b. Sebagai alternatif referensi penelitian ilmiah yang dapat digunakan untuk kegiatan penelitian selanjutnya dengan tema yang berkaitan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu alternatif pertimbangan sekaligus masukan bagi seluruh pihak *stakeholders* pariwisata yang berkepentingan serta berkontribusi dalam mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.
  - b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu acuan atau pedoman bagi pihak-pihak terkait tentang pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan serta dikembangkan secara optimal.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dilakukan dengan tujuan agar pembaca mudah memahami tentang alur pemikiran penulis yang terkandung dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis menguraikan secara garis besar dalam bentuk bab diantaranya sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Pada latar belakang memberikan penjelasan tentang seputar pariwisata dan perkembangannya secara umum, seputar pariwisata dan program yang dicanangkan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumenep, khususnya di Wisata Bahari Pulau Gili Labak, serta menjelaskan permasalahan yang terkait dengan persepsi-persepsi masyarakat lokal tentang kegiatan pariwisata untuk dapat ikut berpartisipasi atau berkontribusi dalam pengembangan pariwisata.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, definisi pariwisata, jenis-jenis wisata, definisi wisatawan, pengembangan destinasi pariwisata, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dampak-dampak dari pengembangan pariwisata serta respon masyarakat terhadap dampak

pengembangan pariwisata yang nantinya menumbuhkan faktor penghambat dan faktor pendorong masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang teori metode-metode yang digunakan dalam penelitian yakni jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik *sampling*, instrumen penelitian, analisis data, serta keabsahan data.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang lokasi dan situs penelitian yang didalamnya mencakup letas secara geografis, pembagian dan luas wilayah, serta visi dan misi. Fokus pembahasan yaitu partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang ditinjau berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hasil temuan tersebut kemudian dideskripsikan mengenai faktor penghambat dan faktor pendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisi tentang hasil rinci dari temuan di lapangan sehingga dapat dan mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan saran berisi tentang masukan-masukan atau arahan yang diberikan oleh peneliti untuk pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis untuk dijadikan sebagai acuan tentang penelitian yang akan dilakukan. Adapun dari penelitian terdahulu yang disajikan dianggap sesuai atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian yang membahas tentang analisis partisipasi masyarakat dalam melakukan pengembangan pada pariwisata suatu daerah. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

Nawawi (2013) dengan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberagaman fungsi pantai Depok yang memberikan konsekuensi pada pengelolaannya, yang tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah setempat atau pengelola kawasan saja, tetapi juga pihak yang paling dekat dengan lingkungan pantai Depok yaitu masyarakat pantai Depok, karena mereka bersentuhan setiap saat dengan dinamika yang ada di kawasan tersebut. Oleh karena itu partisipasi masyarakat merupakan kunci utama pengelolaan pantai yang akan berimbas pada jumlah kedatangan wisatawan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengelolaan wisata Pantai Depok diwujudkan dengan mendirikan Koperasi Wisata Mina Bahari 45 Pantai Depok dari bukti partisipasi masyarakatnya. Koperasi tersebut merupakan

wadah organisasi masyarakat yang ada di pesisir Pantai Depok, dan sebagian besar dari masyarakat yang bergabung pada koperasi ini adalah masyarakat yang berada sekitar Pantai Depok. Hal ini juga merupakan kebijakan koperasi yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata di Pantai Depok. Adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Pantai Depok juga tidak hanya pada masalah pengelolaan sampah, tapi juga mengenai pembuangan limbah cair, daur ulang sampah, pengadaan air bersih, dan evaluasi lingkungan. Sehingga dari masyarakat Pantai Depok sendiri juga berpartisipasi dan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap keamanan di kawasan Pantai Depok.

Prasetia (2015) dengan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekowisata Berbasis Pantai”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya otonomi daerah menyangkut pelaksanaan pembangunan dituntut lebih aspiratif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata. Keamanan, ketertiban dan kebersihan daerah tujuan wisata tidak selalu menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat harus aktif dan berinisiatif menertibkan, menjaga kesehatan dan konservasi lingkungan.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekowisata berbasis pantai di Kota Probolinggo sebagian besar sudah terlibat langsung dalam proses pengembangan usaha ekowisata. Sedangkan untuk bentuk partisipasi masyarakatnya masih

cenderung di dominasi oleh sebagian masyarakat sekitar yang memahami tentang adanya proyek pengembangan ekowisata. Selain itu, yang menjadi faktor pendorong dalam pengembangan usaha ekowisata adalah adanya sebagian dari masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengembangan ekowisata, sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan aparat birokrat yang kurang mensosialisasikan mengenai program pengembangan ekowisata.

Prabowo (2016) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul”, dengan melakukan studi di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembangunan masyarakat lokal yang mensyaratkan pengoptimalan dalam berpartisipasi aktif pada Desa Wisata Pujonkidul dalam pengembangan desa wisata masih terkendala oleh hambatan yang berasal dari masyarakat sendiri. Masyarakat Desa Pujonkidul masih mengalami hambatan dalam proses partisipasi aktif yang berasal dari kurangnya motivasi masyarakat, sosialisasi, sumber daya manusia rendah, keterbatasan lahan peternakan, kesulitan masyarakat dalam mengurus perizinan terkait produk olahan makanan khas. Desa Wisata Pujonkidul dapat menjadi desa wisata unggulan jika elemen-elemen yang ada didalamnya turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Mewujudkan hal tersebut, maka partisipasi aktif secara merata menjadi prioritas utama.

Hasil penelitiannya adalah melihat bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ternyata dalam partisipasi buah pikir masih belum melibatkan

masyarakat untuk menuangkan ide-ide terkait kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Desa Wisata Pujon Kidul. Namun untuk bentuk partisipasi lainnya seperti partisipasi tenaga fisik, masyarakat sudah terlibat dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur wisata, dan untuk partisipasi keterampilan dan kemahiran, masyarakat dilibatkan dalam hal edukasi pertanian, peternakan, pembuatan makanan khas, pengelolaan *outbound*, pembuatan paket wisata, penyediaan *homestay*, dan penyediaan pemandu lokal. Selain itu juga adanya partisipasi harta benda yang berupa dengan menerapkan *sapta pesona*. Untuk hal-hal yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dikarenakan motivasi yang rendah, SDM rendah, kesulitan di bidang politik dan regulasi dalam perizinan pembuatan makanan khas. Sedangkan untuk faktor pendorongnya adalah adanya kepedulian dan komunikasi yang terjalin baik.

Cahya (2016) dengan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Atraksi Wisata Air Terjun Kampunganyar Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan persepsi pada masyarakat bagian barat dan masyarakat bagian timur di Kampunganyar terkait pengembangan atraksi, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang berakibat terpecahnya hubungan masyarakat tersebut. Perpecahan tersebut dapat membuat membuat pengembangan semakin tidak terarah, sehingga pengembangan atraksi wisata air terjun Kampunganyar diambil alih oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk menghilangkan perpecahan di antara masyarakat.

Hasil penelitiannya adalah usaha masyarakat dalam merintis Desa Kampunganyar menjadi terkenal, yang mana dalam proses pengembangannya terjadi banyak kendala yang dialami masyarakat seperti kurang diterimanya pengembangan tersebut oleh sebagian masyarakat, dan yang akhirnya menimbulkan perpecahan antara kelompok masyarakat. Dari hal inilah, akhirnya atraksi wisata air terjun Kampunganyar dikelola oleh BUMDES. Untuk faktor penghambat partisipasi masyarakat dikarenakan terjadinya kecemburuan sosial di masyarakat, sedangkan faktor pendorongnya adalah pengaruh dari desa tetangga yang sudah terlebih dahulu memiliki atraksi wisata, selain itu dari kegiatan pengembangan tersebut mampu menghasilkan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Munawaroh (2017) dengan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Gunung Merbabu Dusun Suwantiing Banyuroto Sawangan Magelang Jawa Tengah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pariwisata pendakian Taman Nasional Gunung Merbabu yang seharusnya dapat dioptimalkan, mengingat banyaknya wisatawan yang tertarik untuk melakukan pendakian. Hal ini tidak dilihat sebagai potensi pendapatan saja, namun juga sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan, sebagai salah satu motivator untuk perkembangan industri pariwisata. seharusnya masyarakat memiliki peranan dan keterlibatan baik untuk mengelola maupun memasarkan produk-produk pariwisata agar dapat menjadi sumber potensial bagi daerah. Adanya pariwisata tersebut berdampak pada masyarakat Dusun Suwantiing khususnya

meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Karena dari sebuah pariwisata pendakian, para wisatawan atau pendaki akan membutuhkan baik informasi mengenai Taman Nasional Gunung Merbabu, maupun keperluan lainnya.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berupa masyarakat terlibat dalam pengembangan pariwisata untuk mempertajam dan memantapkan citra pariwisata dengan peningkatan pemasaran melalui media sosial dan aksesibilitas. Kegiatan untuk meningkatkan mutu kerja dan pelayanan yakni: studi banding, mengikuti pameran, pembenahan pariwisata jalur pendakian, pelatihan SAR, operasi bersih, pelatihan penanganan kebakaran hutan, penanaman dan penghijauan, rapat rutin, pelatihan pemandu gunung. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian. Partisipasi masyarakat bermanfaat pada peningkatan taraf hidup masyarakat dari aspek pengetahuan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Faktor pendorong partisipasi masyarakat adalah diberikannya kesempatan, tuntutan lingkungan, untuk kemajuan daerah, manfaat yang dirasakan. Faktor penghambat partisipasi adalah latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin.

Berdasarkan uraian di atas tentang penelitian terdahulu, maka dapat disederhanakan dalam bentuk Tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Nawawi (2013)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis	1. Partisipasi masyarakat 2. Pengelolaan wisata pantai	1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Depok. 2. Pengelolaan wisata pantai Depok yang secara administratif masih disatukan oleh Pemda Kabupaten Bantul dengan kawasan wisata lainnya.
2	Prasetya (2015)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekowisata Berbasis Pantai	1. Partisipasi masyarakat 2. Pengembangan usaha ekowisata berbasis pantai	1. Pengembangan usaha ekowisata di Kota Probolinggo. 2. Bentuk partisipasi masyarakat 3. Faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan ekowisata
3	Prabowo (2016)	Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul	1. Partisipasi masyarakat 2. Pengembangan desa wisata	1. Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi buah pikir, tenaga fisik, keterampilan dan kemahiran, dan harta benda. 2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan desa wisata.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
4	Cahya (2016)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Atraksi Wisata Air Terjun Kampunganyar	1. Partisipasi masyarakat 2. Pengembangan atraksi wisata	1. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi. 2. Faktor penghambat dan pendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata. 3. Hasil yang dirasakan dari partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata.
5	Munawaroh (2017)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Gunung Merbabu	1. Partisipasi Masyarakat 2. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	1. Bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. 2. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata taman nasional. 3. Faktor yang menghambat dan mendukung masyarakat untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018

Pentingnya adanya penelitian terdahulu adalah untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang diteliti saat ini agar memiliki perbandingan dan mengetahui tentang persamaan serta pembaharuan dalam penelitian

selanjutnya. Penelitian yang saat ini dibahas oleh peneliti yaitu memiliki judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.” Adapun perbedaan dan persamaan dari peneliti terdahulu yaitu, penelitian yang saat ini membahas tentang partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep masih belum maksimal. Kontribusi yang masyarakat lokal yang diberikan untuk mendukung pengembangan pariwisata masih membutuhkan sosialisasi yang optimal dari pihak Disbudparpora dan pihak Pokdarwis. Proses peningkatan peran masyarakat untuk terlibat juga masih bertumpu pada kelompok (Pokdarwis). Faktor umur, pengetahuan (pendidikan) dan pengalaman menjadi pemicu untuk masyarakat lokal tidak ikut terlibat atau berpartisipasi dalam pengembangan. Sedangkan adanya motif dasar (keinginan dasar) dan beberapa harapan yang mampu memicu sebagian masyarakat untuk berkontribusi dalam pengembangan. Namun kontribusi mereka masih sebatas pendukung, karena pelaku utama yang mampu terlibat dalam pengembangan masih dapat dijelaskan bahwa dikuasi oleh dari biro perjalanan yang merupakan orang-orang yang diluar Pulau Gili Labak. Biro perjalanan ini membuat paket wisata untuk ditawarkan melalui media elektronik sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Gili Labak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dan persamaan yang ditemukan pada penelitian yang saat ini yaitu, bahwa dari adanya analisis partisipasi masyarakat lokal yang dilakukan sekarang adalah untuk mengetahui, melihat, dan menganalisis lebih dalam lagi tentang partisipasi masyarakat lokal yang telah atau yang akan dikontribusikan untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Selain itu, juga untuk mengetahui tentang hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong partisipasi masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu objek wisata bahari yang baru dikelola dan dikembangkan serta masih berada dalam taraf proses pengembangan yang lebih optimal. Sehingga partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan potensi dan lingkungan serta diharapkan masyarakat juga mampu memanfaatkan potensi untuk kesejahteraan di daerahnya. Sedangkan pada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian dilakukan untuk melihat hasil proses partisipasi masyarakat yang ada dalam mendukung pengembangan pariwisata ataupun keberlanjutan pengembangan pariwisata yang umumnya adalah pada pengembangan objek wisata yang pada dasarnya membutuhkan penuh adanya partisipasi masyarakat (berbasis masyarakat), misalnya pengembangan pada desa wisata. Persamaanya pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu sama-sama menganalisis tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Pariwisata**

#### **a. Definisi Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan (pendapatan), standar hidup yang lebih baik, serta mampu mendukung sektor-sektor produktivitas lainnya (Pendit, 1986:29). Pada dasarnya pariwisata juga merupakan sebuah fenomena sosial yang didefinisikan sebagai konsekuensi dari adanya pergerakan orang ke suatu tempat dan tinggal sementara di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal asalnya (Sharpley, 2014:38). Pendapat lain juga menjelaskan bahwa pariwisata merupakan aktivitas yang berupa sebuah pelayanan dari produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang nantinya mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan (Muljadi, 2016:8). Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 3 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa:

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.”

Berdasarkan penjelasan Undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa, pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang baik dari para *stakeholders* pariwisata. Pariwisata juga merupakan sebuah aktivitas yang cukup kompleks dan mampu memberikan manfaat

positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat di suatu daerah tertentu, jika potensi yang dimiliki mampu dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Banyak pendapat tentang pariwisata yang dikemukakan secara berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati didalam batasan tentang pariwisata (khususnya pariwisata internasional), yaitu sebagai berikut (Pitana, 2009:46):

- 1) *Traveler*, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas
- 2) *Visitor*, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalanannya bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan, atau penghidupan di tempat tujuan.
- 3) *Tourist*, yaitu bagian dari *visitor* yang menghabiskan waktu paling tidak satu malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pariwisata yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pariwisata disini merupakan suatu kegiatan industri yang mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah, yang dalam kegiatannya terdapat didukung oleh semua pihak *stakeholders* pariwisata dalam berbagai fasilitas dan layanannya serta dalam kegiatan tersebut juga adanya seseorang atau sekelompok yang melakukan perjalanan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tidak bertujuan

untuk mencari nafkah, berada dalam jangka waktu tertentu yang sifatnya tidak menetap.

#### **b. Jenis-jenis Wisata**

Pada kenyataannya jenis-jenis wisata tergantung pada kondisi dan situasi perkembangan dunia pariwisata di suatu daerah atau negara yang memang menginginkan industri pariwisatanya dapat maju berkembang. Pada dasarnya semuanya tergantung pada selera atau daya kreativitas para *stakeholders* pariwisata yang berkepentingan serta berkecimpung dalam industri pariwisata. Ketika memiliki kekreativitasan dan gagasan-gagasan yang banyak, otomatis makin banyak pula bentuk dan jenis wisata yang dapat diciptakan bagi kemajuan industri pariwisata, termasuk gagasan-gagasan untuk menciptakan bentuk dan jenis wisata baru. Namun, untuk lebih jelasnya Pendit (1986:36-42) menjelaskan tentang jenis-jenis wisata yang telah terkenal dewasa ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan dengan adanya keinginan untuk memperluas tentang pandangan hidup seseorang, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni.
- 2) Wisata kesehatan, yaitu perjalanan wisatawan yang mengunjungi tempat peristirahatan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan dan dilakukan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan demi kepentingan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani.

- 3) Wisata olahraga, yaitu perjalanan yang dilakukan wisatawan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga disuatu tempat atau negara.
- 4) Wisata komersial, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial.
- 5) Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan dengan mengunjungi ke suatu kompleks atau daerah perindustrian yang terdapat pabrik-pabrik dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan dan penelitian.
- 6) Wisata politik, yaitu perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan politik.
- 7) Wisata konvensi, yaitu jenis wisata yang menyediakan bangunan dengan ruangan-ruangan tempat bersidang atau pertemuan lainnya yang bersifat nasional maupun internasional serta menyajikan program-program atraksi yang menggiurkan.
- 8) Wisata sosial, yaitu jenis wisata yang perjalanannya diorganisasi secara murah dan mudah dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat lemah untuk melakukan perjalanan.
- 9) Wisata pertanian, yaitu perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dengan tujuan kunjungan untuk melakukan peninjauan dan tujuan studi.

- 10) Wisata maritim atau bahari, yaitu jenis wisata yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air yang dilakukan di danau, bendungan, pantai, teluk, dan laut.
- 11) Wisata cagar alam, yaitu jenis wisata yang perjalanannya dilakukan ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya.
- 12) Wisata buru, yaitu jenis wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memiliki daerah atau hutan untuk tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah.
- 13) Wisata pilgrim, yaitu jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.
- 14) Wisata bulan madu, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan pengantin baru yang memiliki fasilitas-fasilitas khusus demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan yang dilakukan.

Berdasarkan klasifikasi jenis wisata yang telah dijelaskan di atas, maka Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari jenis wisata yang termasuk dalam kategori wisata bahari. Hal ini dikarenakan, wisatawan yang berkunjung akan menikmati keindahan dan kekayaan bawah laut dengan cara melakukan *snorkeling* serta menikmati keindahan alam yang indah.

### c. Definisi Wisatawan

Wisatawan (*tourist*) adalah orang yang melakukan perjalanan sedikitnya adalah 24 jam yang bertujuan untuk menikmati perjalanan dan mencari kesenangan serta tidak mencari nafkah atau pekerjaan di daerah tujuan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa wisatawan merupakan pengunjung yang menginap atau tinggal di suatu tempat atau daerah tujuan wisata, dengan jangka waktu minimal satu malam pada sebuah akomodasi (penginapan) umum atau pribadi di suatu daerah yang dikunjungi tersebut (Arjana, 2016:12). Wisatawan juga diartikan sebagai seorang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata, seperti untuk berekreasi atau mencari kesenangan (*pleasure*), berbisnis (*business*), ataupun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang lain (*special interest*), serta penyegaran kembali (*refreshing*) setelah merasa lelah dalam menjalani aktivitas kegiatan kehidupan sehari-hari yang sifatnya rutinitas (Sunaryo, 2013:3). Selain itu Sunaryo (2013:10) juga menjelaskan tentang hal-hal yang mencakup tentang definisi wisatawan mancanegara adalah sebagai berikut:

- 1) *International tourists* (wisatawan internasional), setiap tamu yang mempunyai lama tinggal paling sedikit 24 jam dan tidak lebih dari enam bulan di negara yang dikunjungi dengan maksud kunjungan atau tujuan perjalanan yang dapat diklasifikasikan dengan tujuan untuk: (1) berlibur, rekreasi dan dan olahraga atau (2) berbisnis, mengunjungi teman dan keluarga, kunjungan misi, menghadiri pertemuan,

konferensi, dan kunjungan untuk alasan kesehatan, belajar, dan kunjungan keagamaan.

- 2) *Excursionist* (pelancong mancanegara), setiap tamu yang berkunjung dan mempunyai lama tinggal di destinasi yang kurang dari 24 jam di negara yang dikunjungi, termasuk didalamnya para *cruise passanger* yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, namun tidak menginap di akomodasi komersial yang tersedia di negara tersebut.

Arjana (2016:13) juga menjelaskan tentang beberapa hal yang dapat dipakai sebagai patokan untuk menentukan seseorang dapat dikatakan sebagai wisatawan atau bukan wisatawan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wisatawan, memiliki ciri mencari kesenangan, melakukan kunjungan keluarga, kunjungan yang bersifat terapi kesehatan, kunjungan terkait *event* olahraga, atau kunjungan yang tujuannya untuk kepentingan pertemuan seperti pertemuan bisnis, tugas pemerintah untuk melakukan rapat-rapat seperti rapat koordinasi (rakor), rapat kerja (raker), dan rapat evaluasi. Wisatawan juga memiliki prinsip bahwa dengan melakukan perjalanan adalah untuk mendapatkan kesenangan dengan berbagai motif perjalanan dan tidak untuk mencari nafkah. Wisatawan juga tidak terlalu mempertimbangkan tentang jarak maupun biaya yang akan dikeluarkan, karena motifnya mencari kesenangan, serta pada umumnya orang yang melakukan wisata merupakan seseorang atau sekelompok orang yang

ekonominya sudah mapan, sehingga tabungannya direncanakan untuk bersenang-senang.

- 2) Bukan wisatawan, memiliki ciri yang menunjukkan adanya seseorang atau sekelompok orang melakukan perjalanan ke daerah tujuan karena terikat kontrak kerja, mencari nafkah/pekerjaan, atau melakukan kegiatan sekolah yang dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa, serta pindah domisili secara permanen yang dikenal sebagai migrasi penduduk. Perjalanan yang dilakukan bagi pelaku yang bukan wisatawan sama sekali tidak ada keinginan untuk menikmati perjalanannya mendapatkan kesenangan, melainkan untuk kegiatan yang benar-benar terkait dengan mencari nafkah, untuk bersekolah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

Dari penjelasan di atas tentang seseorang dapat dikatakan wisatawan atau bukan wisatawan dapat disimpulkan berdasarkan dari Pitana (2009:39) bahwa seseorang yang dapat disebut sebagai wisatawan (dari sisi perilakunya) adalah yang; (a) melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggal normalnya sehari-hari, (b) perjalanan yang dilakukan paling sedikit semalam, tetapi tidak bersifat permanen, (c) perjalanannya dilakukan pada saat tidak bekerja atau mengerjakan tugas rutin lain, melainkan dalam rangka mencari pengalaman yang mengesankan dari adanya interaksi dengan beberapa karakteristik tempat yang dipilih untuk dikunjungi.

#### **d. Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Pengembangan merupakan suatu perbuatan, proses, usaha, hal-hal atau cara untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih maju, baik, sempurna dan berguna (Poerwadarminta, 2007:556). Adapun alasan-alasan yang menjadi landasan perlunya pengembangan dilakukan yaitu sebagai berikut (Yoeti, 1997:33):

- 1) Pengembangan pariwisata erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara.
- 2) Pengembangan pariwisata lebih banyak bersifat non ekonomis, yang artinya wisatawan yang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam, tempat bersejarah, candi-candi, bangunan-bangunan kuno, perkebunan dan sebagainya. Oleh karena itu, semuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pemeliharaan dan perawatannya, yang nantinya dengan majunya pariwisata sebagai industri, biaya yang besar untuk hal-hal tersebut akan dapat diperoleh dari hasil kegiatan pariwisata tersebut.
- 3) Untuk menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah pengertian, dan mampu mengetahui tingkah laku orang lain yang datang berkunjung, terutama bagi masyarakat lokal. Adanya pertukaran pikiran dan interaksi antara wisatawan dengan penduduk setempat akan dapat membuka mata penduduk sekitarnya dalam

banyak hal, serta dengan adanya pengembangan pariwisata, perbedaan pandangan, penafsiran dan salah pengertian dapat dihilangkan.

Selain dalam hal upaya pengembangan pariwisata, ada baiknya jika mengetahui pula tentang urutan pentingnya sifat/ ciri destinasi yang dikembangkan (Pitana, 2009:127):

**Tabel 2.2 Urutan Pentingnya Sifat Destinasi Menurut Wisatawan**

Urutan Pentingnya Sifat Destinasi (dari terpenting ke kurang penting)	Hasil Studi Menurut			
	PATA (1967)	American Express (1977)	PATA (1984) di Hongkong	Dirjen Pariwisata (1993)
1	Masyarakat yang ramah dan hangat	Pemandangan alam yang indah	Pemandangan alam yang indah	Pemandangan alam yang indah
2	Akomodasi nyaman	Sikap ramah penduduk lokal	Masyarakat yang ramah dan hormat	Kehidupan alam yang indah
3	Pemandangan indah	Akomodasi layak	Akomodasi baik dan modern	Kebudayaan masyarakat tradisional
4	Harga-harga layak	Istirahat dan santai	Tidak mahal untuk dikunjungi	Kerajinan dan kesenian
5	Adat istiadat kehidupan masyarakat	Tarif penerbangan	Stabilitas politik negara yang dikunjungi	Pantai

Sumber: Diadaptasi dari Kusudianto (1996:20)

Menurut Sunaryo (2013:159-160), menyebutkan tentang komponen komponen utama yang menjadi dasar dalam upaya pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Objek dan Daya Tarik Wisata (*Atractions*), yaitu terkait dengan daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan, seperti *event* atau terkenal dengan sebutan sebagai minat khusus (*special interest*).
- 2) Aksesibilitas (*Accessibility*), yaitu terkait dengan dukungan sistem transportasi seperti, rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan moda transportasi yang lain.
- 3) Amenitas (*Amenities*), yaitu terkait dengan berbagai fasilitas penunjang dan pendukung wisata seperti, akomodasi, *money charger*, biro perjalanan, *retail shopping*, *tourism information center*, *public safety*, dan rumah makan (*food and baverage*).
- 4) Fasilitas Pendukung (*Ancillary Services*), yaitu terkait dengan ketersediaan berbagai fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan seperti, bank, telekomunikasi, pos, dan rumah sakit.
- 5) Kelembagaan (*Institutions*), yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah (*host*).

Setiap upaya yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata tidak pernah lepas dari yang namanya suatu siklus hidup destinasi yang terjadi pada tahap atau fase pengembangan destinasi pariwisata. Hal ini dapat dijadikan sebagai

acuan bagi pihak *stakeholders* pariwisata dalam membangun dan merencanakan pengembangan destinasi pariwisata untuk kedepannya. Adapun tahapan siklus hidup destinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3 Siklus Hidup Destinasi**

No	Tahapan Siklus	Keterangan
1	<i>Exploration</i> (ekplorasi, penemuan)	Daerah tujuan wisata baru mulai ditemukan, dikunjungi secara terbatas, dan <i>sporadic</i> (tidak merata). Pada tahap ini terjadi kontak yang tinggi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, karena wisatawan menggunakan fasilitas lokal yang sudah tersedia. Jumlah yang terbatas dan frekuensi yang jarang, maka dampak sosial-budaya dan sosial-ekonomi pada tahap ini masih sangat kecil.
2	<i>Involment</i> (keterlibatan)	Adanya peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan, yang akhirnya sebagian masyarakat lokal mulai menyediakan berbagai fasilitas yang memang khusus diperuntukkan bagi wisatawan. Kontak antara wisatawan dengan masyarakat lokal masih tinggi, masyarakat juga sudah mulai mengubah pola-pola sosial yang ada untuk merespon perubahan ekonomi yang terjadi. Pada tahap inilah mulainya suatu daerah menjadi destinasi wisata yang ditandai dengan adanya promosi.

Lanjutan Tabel 2.3

No	Tahapan Siklus	Keterangan
3	<i>Development</i> (pengembangan, pembangunan)	Investasi dari luar mulai masuk, serta mulai adanya pasar pariwisata secara sistematis. Daerah telah semakin terbuka secara fisik dan promosi mulai dikembangkan, menambahkan atraksi wisata. Berbagai barang dan jasa impor sudah menjadi keharusan, termasuk tenaga kerja asing untuk mendukung perkembangan industri pariwisata yang pesat.
4	<i>Consolidation</i> (konsolidasi)	Pariwisata sudah menjadi hal yang dominan dalam struktur perekonomian daerah. Jumlah kunjungan tetap meningkat, namun dengan rata-rata kenaikan yang semakin menurun. Pemasaran semakin gencar dan diperluas, fasilitas yang sudah tua menjadi ketinggalan zaman dan kurang diminati.
5	Stagnation (stagnasi)	Kapasitas maksimal dari faktor penunjang telah mencapai batas maksimum atau terlampaui, sehingga menyebabkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Atraksi buatan menggantikan atraksi alam dan budaya, citra awal sudah meluntur, dan destinasi tidak lagi dianggap menarik.
6	<i>Pasca Stagnation</i> a. <i>Decline</i> (penurunan)	Wisatawan tertarik dan beralih ke destinasi baru. Banyak fasilitas wisata yang sudah beralih atau fungsinya dialihkan untuk kegiatan non-pariwisata, sehingga destinasi menjadi semakin tidak menarik bagi wisatawan. Daerah destinasi terdegradasi kualitasnya. Partisipasi masyarakat lokal meningkat lagi, terkait dengan harga yang merosot turun dengan melemahnya pasar.

Lanjutan Tabel 2.3

No	Tahapan Siklus	Keterangan
	b. <i>Rejuvenation</i> (peremajaan)	Terjadi perubahan dramatis dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya pariwisata. Peremajaan terjadi karena adanya inovasi dalam pengembangan produk baru atau menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya yang sebelumnya belum dimanfaatkan.

Sumber: Butler, 1980 (dalam Pitana, 2009:132-133)

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata

### a. Definisi Partisipasi Masyarakat

Pengembangan pariwisata di suatu daerah pada dasarnya tidak dapat terlepas dari adanya keberadaan warga setempat yang mendukungnya, karena keberadaan objek wisata sebenarnya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan atau meningkatkan kehidupan sosial ekonomi warga sekitar. Selain itu, dalam pembangunan pariwisata seharusnya juga mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk berusaha dan bekerja. Adanya kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, karena dengan hal ini pariwisata akan mampu memberikan kontribusi besar dalam penghapusan kemiskinan di suatu daerah (Hadiwijoyo, 2012:61-62).

Pentingnya peran atau partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata akan mendukung suksesnya atau keberhasilan suatu industri pariwisata yang memiliki jangka panjang nantinya akan sangat tergantung

pada tingkat penerimaan dan dukungan dari masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan, masyarakat lokal akan berperan untuk menyambut kehadiran wisatawan dan sekaligus memberikan layanan yang diperlukan oleh wisatawan (Suswantoro, 2004:23). Masyarakat lokal akan membantu dan tertarik untuk ikut serta dalam pengembangan pariwisata, apabila masyarakat mengetahui tentang apa yang harus dibantu dan masyarakat juga memahami tentang hal yang nantinya membuat masyarakat lokal mendapatkan manfaat positif dari adanya pengembangan pariwisata (Suswantoro, 2004:30). Oleh karena itu, untuk dapat memastikan tentang pengembangan pariwisata di suatu tempat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari masyarakat lokal dalam proses pengembangan dan mampu memaksimalkan nilai atau manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat lokal. Dalam kedudukannya sebagai salah satu *stakeholders*, masyarakat juga memiliki fungsi dan peran sebagai tuan rumah sekaligus sebagai subjek pengembangan yang turut aktif dalam memberikan peran dan kontribusinya dalam pembuatan keputusan dalam pembangunan kepariwisataan (Sunaryo, 2013:218-219).

Definisi partisipasi masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai suatu keterlibatan anggota masyarakat dalam suatu proses pengembangan, yang mana masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pengembangan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat juga dapat dikatakan

sebagai aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan (Adisasmita, 2006:34). Berikut merupakan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* pariwisata (Sunaryo, 2013:217):

- 1) Pemerintah (sebagai fasilitator dan regulator)
- 2) Swasta (sebagai industri/pengembang/investor)
- 3) Masyarakat (sebagai tuan rumah, pelaksana/subjek pengembangan)

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat juga menjadi sebagai salah satu pelaku penting dalam pengembangan pariwisata, dan harus mampu terlibat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi untuk program kegiatan pariwisata. Selain menjadi sebagai subjek pengembangan, masyarakat lokal juga mampu menerima manfaat secara ekonomi yang signifikan dalam pengembangan kegiatan pariwisata seperti halnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi dan budayanya. Berikut merupakan tiga alasan utama yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah perencanaan pembangunan atau pengembangan, yaitu (Conyers, 1991:154-155):

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya, pelaksanaan program-program pembangunan tidak optimal.

- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan apabila masyarakat juga dilibatkan dalam setiap tahapan atau prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan *monitoring*. Sehingga dengan demikian masyarakat akan lebih mengetahui seluk-beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
- 3) Merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Masyarakat akan mempunyai hak untuk turut serta dalam menentukan dan merencanakan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya.

**b. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata**

Suswanto (2004:85) mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata menjadi dua bentuk partisipasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi aktif, yaitu peran atau dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, yang secara sadar ikut membantu program pemerintah dengan inisiatif dan kreasi dalam melibatkan diri dalam kegiatan pengembangan pariwisata dengan melalui pembinaan rasa ikut memiliki.
- 2) Partisipasi pasif, yaitu peran atau dukungan dari masyarakat yang bersifat tidak langsung, masyarakat cenderung sekedar melaksanakan

perintah dan mendukung terpeliharanya konservasi sumber daya alam serta timbul kesadaran untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam.

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat lokal di sekitar kawasan objek wisata juga dapat berbentuk suatu usaha dagang atau pelayanan jasa baik didalam maupun diluar objek wisata, yaitu dapat berupa pelayanan yang memberikan jasa penginapan (*homestay*), jasa penyediaan makanan dan minuman (toko, warung, atau restoran), penyediaan jasa penjualan cinderamata khas daerah (toko souvenir), jasa pemandu wisata atau penunjuk jalan (*guide atau tour leader*), jasa fotografi, dan menjadi pegawai perusahaan/pengusahaan wisata alam. Sehingga dari adanya kegiatan usaha masyarakat tersebut, secara tidak langsung akan menciptakan keikutsertaan masyarakat dalam memiliki tempat mata pencaharian yang pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan pariwisata (Suswantoro, 2004:86).

Mowforth dan Maunt (2000:146) juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat dibedakan menjadi tujuh dengan karakter setiap tipe adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi manipulatif, yaitu partisipasi orang-orang yang mewakili organisasi resmi, tetapi tidak terpilih dan tidak memiliki kekuasaan.
- 2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi terhadap apa yang telah diputuskan oleh orang lain atau terhadap apa yang telah terjadi dan diberitahukan secara sepihak oleh manajemen proyek tanpa mendengarkan

tanggapan orang lain. Dalam hal ini, informasi yang ada hanya milik ahli eksternal.

- 3) Partisipasi dengan konsultasi, yaitu partisipasi yang diawali dengan konsultasi ke ahli eksternal.
- 4) Partisipasi untuk bahan insentif, yaitu partisipasi dengan menyediakan sumber-sumber, seperti sebagai tenaga kerja atau menyediakan sebidang lahan.
- 5) Partisipasi fungsional, yaitu partisipasi dengan melibatkan ahli eksternal sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek setelah keputusan mayoritas dihasilkan. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat membantu ahli eksternal.
- 6) Partisipasi interaktif, yaitu partisipasi sebagai hak, tidak hanya untuk mencapai tujuan proyek, tetapi juga prosesnya meliputi metodologi interdisiplin yang mencari perspektif beragam dan menggunakan proses belajar sistematis dan terstruktur sebagai kelompok pengambil kontrol keputusan lokal dan menentukan penggunaan sumber-sumber yang tersedia.
- 7) Mobilisasi sendiri, yaitu partisipasi dengan mengambil inisiatif sendiri.

Di bawah ini merupakan proses peningkatan peran serta atau partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut (Sunaryo, 2013:222-223):

- 1) Tahap perencanaan, pada tahap ini menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat lokal yang terutama berkaitan dengan adanya identifikasi

terhadap masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, analisis dan peramalan terhadap kondisi lingkungan di masa mendatang, dan pengembangan alternatif rencana dan fasilitas.

- 2) Tahap implementasi, pada tahap ini menunjukkan adanya bentuk keterlibatan masyarakat yang terutama terkait dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan, pengelolaan objek atau usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan kepariwisataan.
- 3) Tahap *monitoring* dan evaluasi, pada tahap ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi masyarakat yang terwujud dalam peran dan posisi masyarakat dalam tahap *monitoring* atau evaluasi serta memperoleh nilai manfaat secara ekonomi maupun sosial budaya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.

### **c. Dampak Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata dalam realitasnya tidak hanya menimbulkan dampak yang sifatnya positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang sifatnya negatif. Dampak pariwisata dapat bersifat positif maupun negatif, namun dampak positifnya jauh lebih besar dari pada dampak negatifnya. Hal ini dapat diketahui dari adanya peningkatan kesejahteraan terutama bagi pelaku bisnis pariwisata dan usaha yang terkait (Arjana, 2016:155).

Berikut merupakan jenis-jenis dampak yang ditimbulkan dari adanya pembangunan pariwisata di beberapa bidang adalah sebagai berikut (Yoeti, 2008:20-24):

1) Dampak pada Bidang Ekonomi:

- a) Dapat menciptakan kesempatan berusaha, yang artinya dengan datangnya wisatawan, diperlukan pelayanan untuk menyediakan kebutuhan (*need*), keinginan (*want*), dan harapan (*expectation*) dari wisatawan yang terdiri dari berbagai kebangsaan dan tingkah lakunya.
- b) Dapat meningkatkan kesempatan kerja (*employments*).
- c) Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, yang diakibatkan dari adanya *multiplier effect* yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar.
- d) Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah.
- e) Dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya.
- f) Harga tanah menjadi mahal, pantai-pantai dikaveling, sehingga dari hal ini sering terjadi spekulasi harga yang pada akhirnya meningkatkan harga tanah di sekitarnya.

g) Di pusat-pusat kegiatan pariwisata harga-harga bahan makan dan minum menjadi mahal, yang nantinya dapat meningkatkan inflasi tiap tahunnya.

2) Dampak pada Bidang Sosial Budaya:

- a) Sering terjadi adanya komersialisasi seni-budaya.
- b) Terjadi pemalsuan benda-benda budaya, seperti lukisan dan keramik.
- c) Terjadi *demonstration effect*, yang mana kepribadian anak-anak mudah rusak, seperti misalnya dalam hal cara berpakaian.
- d) Upacara adat dijual kepada wisatawan demi memperoleh dollar wisatawan.
- e) Ramainya lalu lintas wisatawan yang memungkinkan adanya penyelundupan obat bius dan narkotika.

3) Dampak pada Bidang Lingkungan:

- a) Pembuangan sampah sembarangan yang dapat menimbulkan bau tidak sedap dan juga membuat tanaman di sekitarnya mati (punah).
- b) Pembuangan limbah hotel, restoran, dan rumah sakit yang merusak air sungai, danau atau laut.
- c) Kerusakan terumbu karang sebagai akibat dari nelayan yang tidak lagi “memiliki” pantai untuk mencari ikan, karena pantai telah dikaveling untuk membangun hotel dan restoran.

Akibatnya, para nelayan membom terumbu karang, yang akibat lebih jauhnya lagi dapat menghilangkan daya tarik wisata.

- d) Terjadi urbanisasi, para pencari kerja yang berdatangan dari desa ke kota-kota besar.
- e) Perusakan sumber-sumber hayati yang tidak terkendali.

#### **d. Respon Masyarakat terhadap Dampak Pengembangan Pariwisata**

Intensitas dan tipe dari dampak pariwisata sangat tergantung pada kecepatan dan area yang dilingkupi oleh pembangunan pariwisata, yang nantinya dapat berpengaruh pada respon masyarakat yang akan menjadikan atau menentukan mengenai faktor penghambat dan pendorong untuk masyarakat lokal berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Menurut Richardson (dalam Pitana, 2009:209-211) menyebutkan tahapan respon masyarakat terhadap pengembangan pariwisata sebagai berikut:

##### *1) Euphoria*

Masyarakat mendukung pembangunan pariwisata dan siap hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari dengan wisatawan. Umumnya masyarakat mengharapkan dan memperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan baru yang akan didapat, peningkatan pendapatan, dan peningkatan nilai ekonomi. Pada tahapan ini hanya sedikit warga yang menentang pariwisata. Tahapan ini cenderung terjadi ketika kondisi ekonomi lokal mengalami stagnasi dan pariwisata dipandang sebagai sektor yang menawarkan peluang pertumbuhan ekonomi. Dukungan pada tahap ini ini lebih berfokus

pada sisi ekonomi dan kurang memperhitungkan dampak sosial budayanya.

2) *Apathy*

Pertumbuhan industri pariwisata mulai mengalami penurunan, dan menganggap bahwa sektor pariwisata yang memacu pertumbuhan ekonomi daerah tidak lagi dianggap segala-galanya. Struktur sosial kawasan mulai mengalami perubahan oleh kedatangan orang baru yang mencari pekerjaan, peranan keluarga mengalami perubahan karena anggota keluarganya bekerja di pariwisata. Mulai tumbuh rasa apatis terhadap keberadaan pariwisata.

3) *Irritation*

Pengembangan pariwisata mulai tidak lagi sesuai dengan perencanaan awal dan mulai meluas ke area sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan objek wisata tidak lagi menarik dan membuat kunjungan wisatawan menurun, yang akibatnya adalah kelebihan fasilitas yang tersedia tetapi kekurangan wisatawan. Masyarakat lokal mulai kehilangan “tempat” tradisionalnya dan menyalahkan pariwisata atas hal itu.

4) *Antagonism*

Ada kecenderungan wisatawan yang datang selama masa *euphoria* telah digantikan oleh tipe wisatawan yang baru dan kurang menghargai kearifan lokal tetapi berfokus pada ketertarikan faktor fisik alam. Masyarakat menunjukkan sifat *antagonism* mengenai perilaku

wisatawan. Jika tidak ada solusi dengan masalah tersebut, masyarakat bisa saja bertindak agresif dengan melakukan kejahatan. Apalagi, jika masyarakat menganggap bahwa keberadann pariwisata sama sekali tidak memberi manfaat.

Berdasarkan dari uraian tahapan respon masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata akan membentuk yang namanya persepsi positif atau persepsi negatif masyarakat lokal, yang nantinya akan muncul tentang hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan pendorong untuk masyarakat lokal berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata berdasarkan persepsi masing-masing masyarakat.

**e. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata**

Faktor penghambat maupun faktor pendorong akan muncul terkait tentang pandangan masyarakat pada pengembangan pariwisata. Apabila masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kegiatan pariwisata, secara otomatis akan menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata. Jika adanya kesadaran dari masyarakat lokal tentang potensi manfaat dari kegiatan pariwisata akan menjadi faktor pendorong yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pariwisata (Wang *et al.*, 2006:412).

Selain itu, hal yang menjadi faktor pendorong bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata adalah dengan adanya atau

munculnya berbagai macam kebutuhan yang sifatnya hirarki, seperti sebagai berikut (Maslow dalam Minderop, 2010:48-49):

1) Kebutuhan Dasar Fisiologis (Fisik)

Kebutuhan fisiologis merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dan untuk pemenuhannya tidak dapat ditunda karena merupakan pemenuhan yang paling mendesak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diantaranya ada kebutuhan pakaian (sandang), makanan dan minuman (pangan), tempat tinggal (papan), istirahat, dan lain sebagainya.

2) Kebutuhan Psikis

Kebutuhan psikis merupakan suatu kebutuhan yang akan diusahakan atau dipenuhi oleh manusia jika merasa kebutuhan dasar fisiologisnya sudah terpenuhi. Jika kebutuhan dasar fisiologis manusia sudah terpenuhi, maka manusia akan memiliki motivasi untuk bergerak dalam memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi.

Adapun kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan psikis terdiri dari beberapa kebutuhan diantaranya sebagai berikut:

- a) Kebutuhan akan rasa aman, yaitu rasa aman fisik, perlindungan dan kebebasan dari hal-hal yang mengancam seperti rasa takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan.
- b) Kebutuhan rasa cinta dan memiliki, yaitu kebutuhan yang mendorong untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan, dan keturunan.

- c) Kebutuhan harga diri, yaitu terbagi menjadi dua kategori kebutuhan yang lebih rendah (kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, dan penghargaan dari orang lain), dan kebutuhan yang tinggi (kebutuhan akan penghormatan dan penghargaan dari diri sendiri, termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian dan kebebasan).
- d) Kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan yang berada pada tingkatan terakhir berdasarkan kebutuhan Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang mampu mendorong manusia untuk mengungkapkan diri (aktualisasi diri), yang dapat diartikan sebagai hasrat manusia untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi yang ada dalam dirinya, hasrat untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya dengan kemampuan sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya dan menjadi kreatif untuk bebas mencapai puncak prestasi untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan berdasarkan potensi yang dimiliki.

Tosun (2000:615) juga mengidentifikasi tiga hal utama yang menjadi faktor penghambat untuk masyarakat berpartisipasi dalam mendukung proses pengembangan pariwisata dalam konteks negara berkembang yaitu:

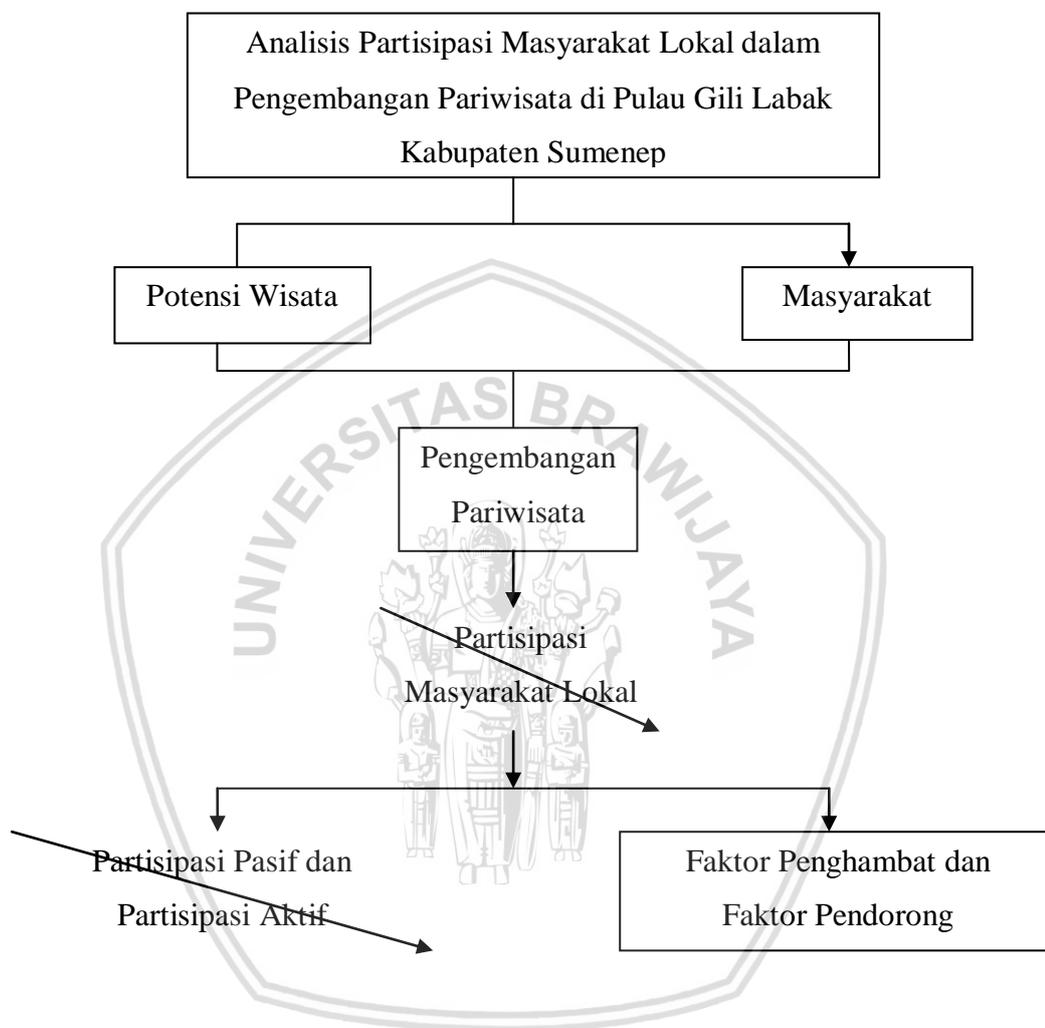
- a) Keterbatasan operasional, hal ini meliputi tentang pemusatan administrasi publik dalam bidang pariwisata, serta kurangnya koordinasi dan kurangnya informasi.

- b) Keterbatasan struktural, hal ini meliputi tentang kurangnya keahlian, kurangnya peraturan yang sesuai, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan kurangnya sumber-sumber pendanaan.
- c) Keterbatasan kebudayaan, hal ini meliputi tentang kapasitas yang terbatas dalam masyarakat miskin, dan sikap apatis serta tingkat kesadaran yang rendah dalam komunitas lokal.

Selain itu ada juga faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut (Sumarto, 2004:103):

- a) Sulit mendapatkan informasi tentang rapat-rapat terbuka yang bisa diikuti dalam rapat dan forum warga.
- b) Ketidakjelasan kriteria yang diambil oleh pemerintah daerah dalam memilih forum warga yang layak diundang untuk mengikuti pertemuan.
- c) Sulit mengakses dokumen politik dan sulit untuk memperoleh dokumen perundang-undangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### f. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan tentang analisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu fenomena sosial atau alam secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian ini juga digunakan untuk menguji suatu hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan mengenai berbagai peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hal ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab segala aspek atau fenomena terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep secara mendalam. Penelitian kualitatif disini merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau cara-cara lainnya yang menggunakan angka. Kualitatif disini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta yang hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa, atau kata-kata (Gunawan, 2013:82). Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang

terjadi dalam lingkup setempat. Dari data kualitatif, penulis dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya, yang akhirnya membentuk kerangka teoritis baru serta data tersebut dapat membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal (Miles dan Huberman, 1992:1-2). Penelitian kualitatif juga dikatakan sebagai penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku dari setiap individu atau kelompok orang (Moleong, 2012:5).

## **B. Fokus Penelitian**

Permasalahan dalam penelitian adalah permasalahan yang memiliki cakupan sangat luas. Berdasarkan judul skripsi ini tentang Analisis Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, maka peneliti membuat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat lokal dalam berkontribusi untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, ditinjau dari:
  - a. Proses peningkatan peran serta atau partisipasi aktif masyarakat (tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap monitoring dan evaluasi)
  - b. Bentuk partisipasi pasif masyarakat
  - c. Bentuk partisipasi aktif masyarakat

2. Faktor penghambat dan faktor pendorong masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, ditinjau dari:
  - a. Faktor penghambat masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.
  - b. Faktor pendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di wilayah Kabupaten Sumenep dan situs penelitiannya di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Alasan dipilihnya Pulau Gili Labak sebagai situs penelitian ini dikarenakan Pulau Gili Labak merupakan salah satu objek daerah tujuan wisata di kepulauan yang menawarkan wisata bahari dan masih terbelang baru dan memiliki keindahan alam yang cukup berpotensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan di Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan, dulunya pulau ini hanya merupakan sebuah pulau tikus dan menjadi tempat sarang tikus yang keberadaannya cukup terpencil dan aksesnya sulit. Hal ini disebabkan lokasi yang terpencil dan cukup sulit untuk dijangkau, kehidupan masyarakatnya yang masih awam tentang pariwisata, serta minimnya sarana, prasarana dan infrastruktur untuk mendukung adanya kegiatan wisata. Oleh karena itu, peran atau partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak pada awal pengembangan pariwisata

bahkan hingga saat inipun masih sangat dibutuhkan dalam menentukan pengembangan pariwisata yang nantinya dapat berkelanjutan sekaligus mendukung program pemerintah dalam melakukan pengembangan objek wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumenep. Selain itu, adanya program pemerintah yang bertema “*Visit Sumenep 2018*” juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan tidak menutup kemungkinan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara yang nantinya berkunjung ke Pulau Gili Labak akan lebih banyak dari sebelumnya, terkait Pulau Gili Labak yang juga dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang akan disasar.

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut (Wardiyanta, 2006:28):

1. Data Primer, merupakan sumber data atau informasi yang diperoleh dari sumber asli, informasi dari tangan pertama atau responden. Data ini akan diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara langsung kepada para narasumber atau informan yang terkait, diperoleh dari observasi langsung di lapangan, dan pihak-pihak yang termasuk dalam narasumber sebagai data primer dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, khususnya pihak yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Pulau Gili Labak

Kabupaten Sumenep, tokoh masyarakat dan masyarakat lokal atau para pelaku-pelaku usaha pariwisata yang berada di kawasan Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang merupakan masyarakat sekitar di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, dan beberapa wisatawan yang berkunjung di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.

2. Data Sekunder, merupakan sumber data atau informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari responden, tetapi dari pihak ketiga. Data ini dapat diperoleh melalui media lain yang terkait seperti, jurnal, koran, dokumen pribadi atau dokumen resmi seperti data statistik kunjungan wisatawan yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, dan internet.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang berdasarkan penjelasan dari Gunawan (2013:143-183) adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu istilah yang diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara sistematis dan peneliti akan langsung terjun ke lapangan yaitu di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep untuk melihat secara langsung peran atau partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam mendukung

pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep sesuai dengan fokus penelitian yang dipilih peneliti. Hal ini bertujuan dan diharapkan peneliti dapat langsung melihat dan memahami keadaan fenomena yang sebenarnya terjadi pada lokasi penelitian terkait aktivitas masyarakat di sekitar objek wisata.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan pembicaraan yang dilakukan antara dua pihak yang terdiri dari pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dan mempunyai tujuan tertentu. Bentuk wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur yang memiliki ciri sebagai berikut (Herdiansyah, 2011:123):

- a. Pertanyaan bersifat terbuka, yang artinya jawaban yang diberikan oleh narasumber tidak dibatasi, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan. Hal ini bertujuan agar subjek dapat lebih bebas dalam mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.
- b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi, yang artinya walaupun ada kebebasan dalam menjawab pertanyaan wawancara, tetapi kecepatan dan waktu wawancara tetap dapat diprediksi.
- c. Fleksibel tetapi terkontrol (dalam hal pertanyaan atau jawaban), yang artinya pertanyaan yang diajukan atau jawaban yang

diberikan bersifat fleksibel dan tergantung pada situasi-kondisi serta alur pembicaraan. Namun, walaupun pertanyaan dan jawaban bersifat fleksibel, tetapi masih ada kontrol (tema wawancara) yang dipegang oleh peneliti.

- d. Ada pedoman wawancara, yang artinya diperlukan pedoman wawancara dalam bentuk wawancara yang semi-terstruktur untuk dijadikan sebagai patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata. Pada pedoman wawancara ini, peneliti juga bebas untuk berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan situasi dan alur alamiah yang terjadi, asal tetap berada pada topik-topik yang telah ditentukan.
- e. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait kepada narasumber, yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam berkaitan dengan topik penelitian, sehingga data yang diperoleh oleh peneliti dapat dimiliki secara langsung dan dapat dipastikan kevaliditasannya. Narasumber dari penelitian ini adalah pihak Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, tokoh masyarakat dan masyarakat lokal atau masyarakat sekitar di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep,

dan para pelaku-pelaku usaha pariwisata yang berada di kawasan Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Proses wawancara akan dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, sekitar kawasan Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, maupun rumah responden dengan cara membuat janji dengan pihak responden melalui telepon, sms, dan bertemu secara langsung dengan responden. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini beserta rincian waktunya yaitu sebagai berikut:

- a. Bapak Nasah Bandy, SE. KP, M.Si selaku Camat Talango Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 8 Maret 2018, pukul 16.30 WIB di JL. Angrek No.8 Bumi Sumekar Kolor, Kabupaten Sumenep (rumah responden).
- b. Bapak Ahmad Hidayat, ST, MM selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, wawancara dilakukan pada hari Jumat, 9 Maret 2018, pukul 09.40 WIB di JL. Dr. Soetomo No.5, Kabupaten Sumenep (kantor Disbudparpora Kabupaten Sumenep).
- c. Bapak Abdul Jalil selaku Ketua RT Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 10 Maret 2018, pukul 09.00 WIB di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep.
- d. Bapak Arwiyanto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, wawancara dilakukan pada hari Sabti,

- 10 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep.
- e. Bapak Warno selaku Wakil Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 10 Maret 2018, pukul 11.00 WIB di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep.
- f. Bapak Erris selaku masyarakat lokal sekaligus pelaku usaha (penyedia jasa untuk kebutuhan wisatawan) Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 10 Maret 2018, pukul 11.45 WIB di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep.
- g. Bapak Toni selaku masyarakat lokal Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 10 Maret 2018, pukul 12.30 WIB di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep.
- h. Saudara Steven selaku wisatawan asal Makassar yang berkunjung ke Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 10 Maret 2018, pukul 12.50 WIB di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep.
- i. Saudara Hasanuddin selaku wisatawan asal Denpasar yang berkunjung ke Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, wawancara dilakukan pada hari Sabtu, 10 Maret 2018, pukul 13.15 WIB di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah dokumen atau data yang diperlukan sebagai bahan informasi yang disesuaikan dengan masalah penelitian, seperti data kunjungan wisatawan, buku catatan, laporan, peraturan atau kebijakan serta dokumen yang terkait.

### F. Teknik *Sampling*

Teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis *sampling* dengan *non-random sampling* atau *non-probability sampling*, yang merupakan metode *sampling* yang setiap individu dari populasi tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Hal ini dikarenakan, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mendasari pemilihan sampel yang harus disesuaikan dengan latar belakang fenomena yang diangkat dan tujuan dari penelitian. Teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposeful sampling*, yang merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih dan ciri-ciri tersebut dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Peneliti dalam hal ini juga menentukan *key informant* (informan kunci) yang sengaja dipilih untuk menjadi sumber informasi terkait tujuan penelitian yang dilakukan. *Key informant* (informan kunci) yang ditentukan peneliti adalah Bapak Ahmad Hidayat, ST, MM selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata Pulau

Gili Labak Kabupaten Sumenep yang mengetahui tentang proses pengembangan yang terjadi di Pulau Gili Labak, dan Bapak Arwiyanto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep dan masyarakat lokal Pulau Gili Labak yang mengetahui tentang kondisi di Pulau Gili Labak dari berbagai aspek (masyarakat, lingkungan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya).

Peneliti dalam penelitian ini juga menggunakan strategi *sampling*, yaitu strategi *sampling* bola salju (*snowball sampling*), yang merupakan strategi penentuan sampel yang berawal dari jumlah kecil, kemudian sampel tersebut disuruh menentukan sampel lain (kenalan atau orang yang juga terkait dengan tujuan penelitian), begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Hal ini dikarenakan, dalam penelitian ini (penelitian kualitatif) terkadang fenomena yang diteliti dapat berkembang menjadi lebih dalam atau lebih luas dari yang ditentukan sebelumnya. Pada situasi tertentu, jumlah subjek penelitian yang terlibat menjadi bertambah karena subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya kurang memberikan informasi yang mendalam. Dalam situasi-situasi tersebut diperlukan penelusuran yang lebih lanjut menuju sasaran yang hendak diteliti. Penelusuran ini biasanya bersifat secara sambung-menyambung hingga akhirnya sesuai dengan sasaran (Herdiansyah, 2011:106-111).

## G. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti itu sendiri dengan cara memperoleh data yang dapat dilakukan menggunakan panca indera peneliti untuk mengamati fenomena yang terjadi saat peneliti di lapangan.
2. Pedoman wawancara, yaitu digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara dengan para narasumber, agar setiap permasalahan atau hal-hal yang akan dipertanyakan tidak hilang dan sekaligus digunakan sebagai panduan oleh peneliti dalam melakukan wawancara.
3. Perangkat penunjang, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa media untuk memperoleh data serta dokumentasi yang terkait dengan penelitian, diantaranya sebagai berikut:
  - a. *Hand Phone* (HP), peneliti akan merekam pada saat melakukan wawancara melalui fasilitas *recorder* yang berguna sebagai alat bantu perekam. Hal ini dilakukan, supaya peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti mencatat jawaban-jawaban dari narasumber.
  - b. Alat-alat tulis, instrumen ini akan membantu peneliti dalam menunjang kegiatan pencatatan dan pengambilan data untuk

mencatat data-data yang terkait. Alat-alat tulis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah buku dan bolpoin.

- c. Kamera, salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendukung peneliti dalam mendokumentasikan hal-hal yang terkait penelitian atau mengambil gambar selama proses penelitian berlangsung.

## H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun proses analisis data atau alur kegiatan dengan teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Miles dan Huberman, 1992:16-20):

1. Pengumpulan data, diartikan sebagai proses untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan dan menggunakan strategi pengumpulan data yang tepat untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan melalui wawancara, dokumentasi dan bahan empiris lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya.

3. Penyajian data, diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berbentuk kutipan wawancara, tabel, dan gambar. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh berupa data dari hasil wawancara, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
4. Simpulan/verifikasi, merupakan suatu kegiatan yang mencari arti dari data-data yang ada serta makna-makna yang muncul dari data lain yang harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yakni merupakan validitas. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan observasi yang sesuai dengan data dalam fokus penelitian yang peneliti ambil, kemudian ditarik kesimpulan yang jelas mengenai masalah atau fenomena yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Kemudian hasil yang diperoleh disesuaikan dengan data yang diperoleh di lapangan, dicocokkan dengan teori yang ada, lalu dilakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

#### **I. Keabsahan Data**

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk menarik kesimpulan. Melihat besarnya posisi data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat

vital. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yang merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data data itu sendiri (Moleong, 2012:330). Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data, yang artinya membandingkan (mengecek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda (Gunawan,2013:219). Hal ini dapat dilakukan atau dicapai dengan cara (Moleong, 2012:331):

1. Membandingkan antara hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan tentang apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan tentang apa yang dikatakan orang-orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan tentang keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan antara hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sumenep adalah salah satu kabupaten yang berada di Madura dan terletak diujung timur setelah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan, yang memiliki 126 pulau dan tersebar membentuk gugusan pulau-pulau yang berpenghuni sebanyak 48 pulau dan yang tidak berpenghuni sebanyak 78 pulau. Secara administratif, Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 9 kecamatan kepulauan, 328 desa atau kelurahan, yang terdiri dari 242 desa di daratan, 86 desa di kepulauan, 1.774 RW (Rukun Warga), dan 5.569 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah Kabupaten Sumenep secara keseluruhan mencapai 2.093.458 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari luas daratan mencapai 1.146.928 km<sup>2</sup> (54,79 %), luas kepulauan 946.530 km<sup>2</sup> (45,21 %), dan luas wilayah perairan mencapai ± 50.000 km<sup>2</sup> (Disbudparpora Kabupaten Sumenep, 2018).

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sumenep yaitu sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Selat Madura

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan

Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu kabupaten di Madura yang cukup memiliki banyak potensi wisata dan saat ini sedang berupaya untuk melakukan pengembangan pada potensi wisata yang dimiliki dan sekaligus mempromosikan kegiatan pariwisata memiliki visi dan misi sebagai berikut:

### Visi

#### “SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Makna dari visi tersebut yaitu:

1. Sumenep Makin Sejahtera disini memiliki dua makna. Pertama, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (*resources*) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (*home industry*) lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat Kabupaten Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai. Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi *trend* terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang terkelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA. Kedua, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya atau tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (*meaning*) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong-royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman *glamourisme* dan pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi budaya maupun perkembangan perubahan masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

2. Pemerintahan yang Mandiri adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Kabupaten Sumenep yang didukung *stakeholders* pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian disini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasarkan prakarsa, usul, atau inovasi masyarakat Kabupaten Sumenep dan direalisasikan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sendiri.
3. Agamis dalam pengertian disini adalah bahwa semua proses dan *output* pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep berakhlakul karimah. Dengan kata lain apabila nilai-nilai luhur agama dijadikan modal atau *spirit* dalam berkehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta masyarakat yang memiliki nilai moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4. Nasionalis adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Transparan atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government*). *Good Governance* di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (*citizen*) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap para pemegang kekuasaan dan masyarakat yang diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (*accountable*), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, *monitoring*, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.
6. Adil adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir “ketimpangan” distribusi pembangunan antara daratan dan kepulauan. Keadilan disini tidaklah bersifat kuantitatif (*fifty-fifty*), namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasarkan pada kebutuhan (*need assesment*) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan “manisnya” pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

7. Profesional bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan *skill* dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional disini tidaklah berarti mendatangkan “orang luar” (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

### **Misi**

Misi merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Adapun misi dari Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, yang artinya Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan, sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Adanya SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan SDA serta lingkungan, yang artinya ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh

ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.

3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi, yang artinya kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Kabupaten Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu memberi dukungan pada kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan *accountable*, yang artinya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalis membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Mewujudkan pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh *stakeholders* baik dari aparat pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparat pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan pemerintahan yang baik

- dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta *stakeholders* dalam proses pembangunan, yang artinya kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggungjawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholders* melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  6. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat, yang artinya Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan mancanegara. Selain itu, masyarakat Kabupaten Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

*Sumber: sipd.kemendagri.go.id, 2016*

Kabupaten Sumenep juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan. Namun, masih ada di beberapa lokasi yang memiliki potensi wisata yang belum mampu dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Salah satunya adalah potensi wisata bahari yang berada di Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep.

Berikut merupakan gambar peta kawasan pengembangan potensi wisata di Kabupaten Sumenep:



**Gambar 4.1 Peta Kawasan Pengembangan Wisata Alam, Bahari, dan Ziarah di Kabupaten Sumenep**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*

Pulau Gili Labak merupakan salah satu pulau kecil yang berada di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Madura. Pulau Gili Labak terletak pada  $\pm 35$  kilometer kearah timur Kabupaten Sumenep, dan bersebelahan dengan Pulau Talango. Pulau Gili Labak memiliki luas sekitar  $\pm 4 \text{ km}^2$ , dan dihuni oleh 37 KK (Kepala Keluarga) dengan jumlah keseluruhan masyarakat  $\pm 100$  orang, dan umumnya masyarakat di Pulau Gili Labak memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Masyarakat lokal yang tinggal di Pulau Gili Labak rata-rata memiliki usia diatas 50 tahun. Hal ini dikarenakan, untuk fasilitas pendidikan di Pulau Gili Labak belum tersedia, sehingga usia anak-anak hingga dewasa (usia pendidikan) tidak tinggal di

Pulau Gili Labak, melainkan tinggal di Pulau Talango untuk bersekolah dan diluar Pulau (merantau) untuk kuliah. Selain untuk tujuan bersekolah, adapula masyarakat di Pulau Gili Labak yang melakukan urbanisasi untuk tujuan mencari pekerjaan (nafkah). Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Pulau Gili Labak masih relatif kecil jika dibandingkan dengan daerah atau pulau lainnya. Hal ini dikarenakan, Pulau Gili Labak pada dasarnya hanya sebuah Pulau Kecil yang keberadaanya cukup terpencil dan minimnya sarana, prasarana dan infrastruktur untuk menunjang kebutuhan masyarakat lokal di pulau tersebut. Seperti misalnya, belum adanya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal, fasilitas penyediaan air bersih, dan fasilitas penerangan (listrik). Namun dengan keberadaanya yang terpencil, Pulau Gili Labak memiliki potensi wisata berupa keindahan bawah laut (terumbu karang) yang didukung oleh keindahan pantainya yang indah dengan pasir putih dan ombak yang tenang (*hidden paradise*).

Jalur untuk mengunjungi Pulau Gili Labak terdiri dari 3 (tiga) jalur jika wisatawan berangkat dari Kabupaten Sumenep, yaitu Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Talango (Pulau Poteran), dan Kecamatan Saronggi. Peneliti menyebrang ke Pulau Gili Labak melewati jalur dari Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep dengan jarak tempuh sekitar  $\pm$  2 jam dengan transportasi laut berupa perahu kecil.

Berikut merupakan gambar peta jalur menuju Pulau Gili Labak:



**Gambar 4.2 Peta Jalur Menuju Pulau Gili Labak, Kabupaten Sumenep**

Sumber: *maps.google.co.id*

Tarif harga transportasi (perahu) yang digunakan untuk menyebrang ke Pulau Gili Labak biasanya ditentukan berdasarkan dari pihak biro perjalanan wisata masing-masing yang menjual paket wisata. Hal ini dikarenakan, kebanyakan orang yang akan berkunjung ke Pulau Gili Labak akan lebih memilih untuk langsung membeli paket wisata yang telah disediakan oleh beberapa biro perjalanan wisata, dibandingkan dilakukan secara pribadi. Umumnya tarif yang ditetapkan untuk jenis paket wisata yang *open trip* adalah  $\pm$  Rp. 85.000/orang, dan untuk jenis paket wisata yang *private trip* adalah  $\pm$  Rp. 800.000/perahu, sedangkan untuk HTM (Harga Tiket Masuk) ke objek wisata masih terbilang relatif murah yaitu hanya dikenakan biaya sebesar Rp. 5000/orang baik untuk wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Pulau Gili Labak Periode Tahun 2016-2017**

No	Tahun	Wisatawan Nusantara (Orang)	Wisatawan Mancanegara (Orang)	Total Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang)
1	2016	33.419	300	33.719
2	2017	30.683	406	31.089

*Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, 2018*

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat disebutkan bahwa Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep secara resmi menjadi sebuah objek daerah tujuan wisata terhitung sejak tahun 2016, hal ini dibuktikan dengan adanya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang telah tercatat dalam data pengunjung daya tarik wisata di Jawa Timur Kabupaten Sumenep. Jika dilihat dari total jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, dapat disebutkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan di tahun 2017 dengan selisih 2.630 orang pada tahun sebelumnya (2016). Dari hal inilah, juga dapat dijadikan sebagai bahan yang harus dianalisis mengenai sebab-akibat yang terjadi pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, hal ini dapat saja terjadi dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakatnya terhadap pengembangan pariwisata yang terjadi (kurang aktif), minimnya sarana, prasarana, dan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, atau kurangnya

tindakan yang lebih optimal dalam hal melakukan pengembangan di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep oleh para *stakeholders* pariwisata yang terkait dalam pengembangan tersebut.

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

Pulau Gili Labak merupakan salah satu jenis objek daerah tujuan wisata yang menawarkan wisata bahari di Kabupaten Sumenep. Pulau Gili Labak juga merupakan sebagai satu-satunya objek wisata bahari yang saat ini dikembangkan di Kabupaten Sumenep dan ditawarkan kepada wisatawan. Pulau Gili Labak memiliki beberapa keindahan yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi pariwisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan. Potensi-potensi tersebut diantaranya berupa keindahan bawah laut (terumbu karang) dan kekayaan biota laut yang hidup didalamnya, serta keindahan alamnya yang didukung dengan pasir yang putih dan ombak yang tenang, serta suasana pedesaan yang menenangkan. Adanya berbagai potensi yang dimiliki Pulau Gili Labak mampu menggerakkan beberapa pihak *stakeholders* pariwisata (dalam hal ini pemerintah, Disbudparpora, pihak swasta, dan beberapa masyarakat lokal) untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi objek daerah tujuan wisata.

Berbagai macam upaya sudah cukup dilakukan oleh beberapa pihak tersebut untuk menjadikan Pulau Gili Labak tempat wisata yang menarik dan mampu mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Upaya pengembangan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait pada potensi di Pulau Gili Labak sudah cukup baik dan

mampu mendatangkan wisatawan. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Nasah Bandy selaku Camat Talango, yang mengungkapkan bahwa:

“Potensi sebenarnya sudah lama (sekitar 5-6 tahun), *boomingnya* sekarang karena juga dari media sosial. Saat ini juga lagi diupayakan untuk air bersih, karena disana belum ada air bersih untuk kebutuhan sehari-hari kaya buat minum, bilas karena selama ini buat dapat air bersih masih ngambil dari talango (Desa Kombang) dimasukin dalam derijen terus dibawa ke Gili Labak. Rencana sih tahun ini akan dibuat penyulingan dari air laut menjadi air bersih. Mungkin 1 bulan lagi akan ada survey, dan rencana pakai dana pusat. Untuk yang mengelolah gili labak masih dikatakan atas nama desa. Dari pemerintah ya ada bantuan-bantuan, dinas hanya membantu (memenuhi kebutuhan). Terus saat ini Pokdarwis juga sudah dibentuk atas inisiatif dari warga sana, dibentuk ya karena ada potensi dan ada kunjungan wisatawan. Biar ada yang lebih mengkoordinasi.” (wawancara pada tanggal 8 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya potensi yang dimiliki di Pulau Gili Labak sudah ada sejak lama, namun belum ada yang menyadari bahwa potensi tersebut dapat dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah daya tarik wisata. Hal ini juga dikarenakan, lokasi Pulau Gili Labak yang keberadaannya cukup terpencil dan merupakan sebuah pulau kecil yang dulunya hanya terkenal sebagai pulau tikus. Hal tersebut juga diperjelas dari cerita singkat tentang sejarah di Pulau Gili Labak oleh Bapak Abd. Jalil selaku Ketua RT di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengungkapkan bahwa:

“Pertama disini ada dua orang laki-laki (Pak Zaimin) dan perempuan yang berasal dari talango, zaman suami istri yang mencari pekerjaan ke jawa dan melihat Gili Labak dan minta mampir ke Gili Labak. Dulu tanah hanya alas, akhirnya yang kedua orang yang dari Talango itu membat untuk tempat tinggal dan juga menanami tanah tersebut untuk kebutuhan makan. Sampai terjadi perkara (dipenjara), karena tidak melapor ke negara. Oleh-oleh dari jawa jagung 2 (buni) tempat, sampai di Gili Labak sekitar 10 hari habis karena dimakan tikus. Sampai sekarang ya sebenarnya tikus masih ada, jadi gini kalo ada kambing atau sapi tikus

baru muncul. Kalau tidak ada sapi dan kambing tikus ya nggak ada. Jadi kaya sebuah larangan itu.” (wawancara pada tanggal 10 Maret 2018).

Selain itu, juga dikarenakan awamnya masyarakat lokal di Pulau Gili Labak tentang pemanfaatan potensi yang terkait pariwisata dan juga kurangnya koordinasi dari tokoh masyarakat. Namun karena semakin canggihnya teknologi, hal ini mampu menjadikan Pulau Gili Labak mulai dikenal oleh masyarakat luas dan akhirnya ada beberapa orang yang berkunjung ke Pulau Gili hingga saat ini dengan didukung dari adanya penawaran paket wisata dari biro perjalanan melalui media elektronik (instagram). Seperti yang disampaikan oleh Bapak Arwiyanto selaku Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Munculnya potensi (booming) 2011, sebenarnya dari dulu tahun 90an, cuman masih tidak ada kesadaran. Berdasarkan cerita dari pak H. Nurhasan (ketua pertama disini, tapi keturunan ketiga dari yang membatat disini), pulau ini memang pada tahun 90-an mau dibeli turis luar dari swiss untuk dijadikan sebagai tempat wisata, sampai meninggalnya belum diijinkan. Sebenarnya ini munculnya Wisata Gili Labak ini belum ada koordinasi dengan warga, karena itu gencarnya media elektronik, ada satu orang kesini, jadi foto-foto disebarluaskan jadi banyak masuk.” (wawancara pada tanggal 10 Maret 2018).

Hal tentang adanya potensi pariwisata di Pulau Gili Labak sejak lama namun belum dimanfaatkan juga diperjelas oleh Bapak Warno selaku Wakil Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Potensi sudah dari dulu, cuman masyarakat tidak mengetahui. Saya sendiri saja mikir buat apa menariknya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan dari pernyataan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya Pulau Gili Labak sudah memiliki potensi yang cukup potensial untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal.

Namun, hal ini masih terkendala pada beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari pihak internal maupun eksternal. Maka dari itu, sangat dibutuhkan dukungan yang maksimal dari semua pihak yang terkait dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak khususnya dari seluruh lapisan masyarakat sekitar. Jika dukungan dari semua pihak dilakukan secara bersama-sama dan mampu disosialisasikan dengan baik, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya pengembangan pariwisata akan menjadi salah satu langkah awal yang baik untuk memperbaiki bahkan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Bentuk upaya dan dukungan sesungguhnya sudah dilakukan dari pihak pemerintah dan Disbudparpora Kabupaten Sumenep, namun hal tersebut tidak kalah pentingnya jika dukungan pada pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak juga diimbangi dari partisipasi aktif masyarakat lokal selaku tuan rumah yang memiliki kawasan objek wisata tersebut.

### **1. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep**

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep sangat diperlukan demi mendukung keberlanjutan pengembangan yang optimal. Adanya partisipasi masyarakat lokal juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat yang diharapkan dari adanya perputaran ekonomi yang terjadi dalam kegiatan pariwisata di Pulau Gili Labak. Partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak dalam pengembangan pariwisata masih dapat dikatakan hampir

keseluruhannya mendukung secara pasif. Padahal partisipasi dari seluruh elemen masyarakat lokal di Pulau Gili Labak sangat diharapkan mampu dijadikan sebagai elemen utama dalam pengembangan pariwisata yang mampu berdaya saing. Maka dari itu, sangat dibutuhkan yang namanya suatu proses sosialisasi yang lebih aktif atau koordinasi yang cukup jelas untuk melakukan pengembangan (pembinaan) pada partisipasi masyarakat setempat yang terbilang masih sangat awam tentang kegiatan pariwisata.

Pengembangan (pembinaan) sumber daya manusia yang dapat dilakukan di langkah awal untuk menumbuhkan bahkan membentuk partisipasi masyarakat lokal yaitu melalui pembentukan sekelompok masyarakat yang mau dan cukup memiliki kesadaran akan pariwisata. hal ini dilakukan, supaya dengan upaya pembentukan kelompok masyarakat tersebut ada yang lebih mengkoordinasi terkait pengembangan pariwisata di Pulau Gili labak. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Pulau Gili Labak telah ada sekitar tahun 2014. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Bapak Arwiyanto selaku Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Pokdarwis dibentuk secara resmi ya tahun 2014 dek. Penggagas utamanya ya sebenarnya dari masyarakat dan juga kades. Pertama kali itu sebenarnya dibentuk sebagai Pokmas (Kelompok pengawas Masyarakat), namun karena Pokmas beranting pada Kecamatan Talango. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Sumenep mengambil alih dan dibentuk menjadi Pokdarwis yang SKnya dikeluarkan oleh Disbudparpora Kabupaten Sumenep. Di SK yang tergabung ada 14 orang dek, tapi cuman golongan pemuda. Tapi diusahakan tercakup semua. Mereka asli sini semua, cuman kebanyakan ada yang merantau ke Jakarta, mangkanya kadang jarang kelihatan disini, mungkin ya hanya saya dan mas Warno (Wakil Ketua Pokdarwis) itu yang masih tinggal disini. Ya untuk jumlahnya sampai sekarang tetap 14 orang. Cuman, saya tetep punya rencana mau dicakup

semua biar enak (ada 38 KK yang masuk data), cuman ya ini masih nunggu waktu yang pas dek.” (wawancara pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan dari pernyataan di atas menyatakan bahwa Pokdarwis secara resmi dibentuk pada tahun 2014. Pada awal pembentukan hingga saat ini masih berjumlah 14 orang yang tergabung dalam Pokdarwis dari keseluruhan jumlah KK yang ada di Pulau Gili Labak. Hal ini dapat dikatakan bahwa masih belum setengah yang bergabung dalam Pokdarwis dari jumlah KK yang ada. Pokdarwis sendiri juga masih berencana untuk mencakup seluruh jumlah KK yang ada untuk bergabung dalam keanggotaan Pokdarwis, karena bagaimanapun juga masyarakat lokal yang ada di Pulau Gili Labak masih saling terikat hubungan keluarga antara yang satu dengan yang lain. Namun, masih ada hal-hal yang menghambat untuk mencakup seluruh jumlah KK yang ada karena masyarakat disana terlalu awam dan hanya percaya penuh pada Pokdarwis untuk mengelolanya. Pada dasarnya orang-orang yang tergabung dalam Pokdarwis pun juga masih dapat dikatakan belum memahami secara penuh tentang pariwisata, namun sebagai orang-orang yang dipercayai akhirnya mereka belajar tentang pariwisata. Hal tersebut diperjelas dari pernyataan Bapak Warno selaku Wakil Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Pengennya dicakup semua, cuman masyarakat percaya penuh sama remaja disini. Kalau disini kan keluarga semua, tiap ada permasalahan, masyarakat pasti memberikan usulan. Rata-rata masih pasif, masih dikatakan mereka belum paham pariwisata. Kita sebagai Pokdarwis juga belajar. Kemarin ada sosialisasi dari Surabaya (Disbudparpora dan Dinas Kelautan) memberikan sosialisasi.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas juga dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya masyarakat lokal di Pulau Gili masih banyak yang pasif untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan. Hal ini masih tetap diupayakan oleh masyarakat lokal yang telah bergabung di Pokdarwis untuk mencakup semuanya supaya masyarakat lokal di Pulau Gili Labak sedikit banyak mengerti tentang pengembangan pariwisata dan dapat memperoleh manfaat yang nantinya dapat meningkatkan seluruh kesejahteraan masyarakat lokal di Pulau Gili Labak. Namun, hal ini masih dapat dikatakan bahwa sulit untuk membina masyarakat lokal yang hampir keseluruhan masih awam, sehingga masih sering terjadi gesekan-gesekan yang ditimbulkan karena adanya kesalahpahaman.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Arwinyanto selaku Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya gini dek, faktor umur juga yang buat mereka gak mau bergabung, karena Pokdarwis diambil oleh saya adalah tokoh pemudanya, tapi yang sepu tetap dibutuhkan sebagai penasehat. Masih ada upaya untuk mengajak, tapi saya masih menunggu waktu yang tepat (karena apa, ini ketidakjalanan ya). Istilahnya, sejak 2016 program Pokdarwis mangkrak (terbengkalai), akibat ada gesekan dengan warga yang belum masuk dalam Pokdarwis, mangkanya saya masih menunggu waktu untuk mengambil hati warga yang belum tergabung, nanti kalau sudah tepat waktunya nanti bisa dicakup semuanya. Kalau sekarang saya bilang masih mangkrak itu, karena masih ada gesekan besar dengan masyarakat. Hal ini akibat, karena sebagian warga tidak menyadari. Dulu itu yang jadi gesekan adalah masalah bayaran Pokdarwis, kan Pokdarwis dibayar perbulan 450 ribu diambil dari pendapatan tiket, yang dibayar itu sisahnya dari kebersihan. Kan masih aturan Perdes (Peraturan Desa) itu 20% untuk desa, 20% untuk Gili Labak, dan 60% untuk warga, yang 60% itu diambil separuh untuk bayar Pokdarwis, dihitung perhari 15 ribu. Karena warga disini sebagian tidak sadar dengan apa yang dilakukan Pokdarwis, karena bagi saya itu

wajar, karena bagi saya 15 ribu itu ya kecil dek. Warga masih ada kecemburuan sosial, mangkanya masih mau disosialisasi lagi sama saya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dengan dibentuknya Pokdarwis (pewadahan) ini diharapkan ada yang mengkoordinasi terkait pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak, sekaligus lebih memudahkan semua masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan, dengan adanya Pokdarwis dapat membantu masyarakat untuk lebih sadar tentang manfaat pariwisata jika dikelola dan dikembangkan secara bersama. Selain itu, juga diharapkan bagi beberapa masyarakat yang telah bergabung dalam Pokdarwis dan berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata sekecil mungkin dapat mempengaruhi masyarakat yang lain yang belum tergabung dalam Pokdarwis dan masih bersikap pasif. Hal ini juga diharapkan, dengan adanya koordinasi dan sosialisai yang baik kepada masyarakat lokal di Pulau Gili Labak terkait pengembangan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sekaligus menyongsong pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak masih dapat dikatakan membutuhkan sosialisasi yang baik untuk membina masyarakat lokalnya agar dapat berkontribusi aktif secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan, masih sangat sedikit masyarakat lokal yang berperan aktif dalam pengembangan. Hal yang membuktikan salah satunya adalah dapat dilihat dari adanya warung yang menyediakan jasa pelayanan untuk kebutuhan masyarakat (seperti

menyediakan makanan, minuman, dan toilet) hanya terdapat 7 (tujuh) warung. Warung-warung yang disediakan di Pulau Gili Labak rata-rata juga dari anggota masyarakat yang telah bergabung di Pokdarwis yaitu ada 5 (lima) warung yang dibuat dari masyarakat yang bergabung di Pokdarwis, karena kebanyakan dari masyarakatnya masih tetap bekerja sebagai nelayan dan petani. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat lokal di Pulau Gili Labak juga masih membutuhkan proses sosialisasi yang lebih signifikan dari berbagai pihak untuk membina masyarakat setempat agar semuanya terlibat aktif dalam pengembangan dan memperoleh manfaat baik yang ditimbulkan.

Adapun proses peningkatan peran serta atau partisipasi aktif dari beberapa masyarakat yang saat ini terjadi di Pulau Gili Labak dalam pelaksanaannya secara garis besar dalam pengembangan pariwisata adalah tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap *monitoring* dan evaluasi.

#### **a. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan disini merupakan mulai adanya keterlibatan masyarakat lokal untuk mengidentifikasi persoalan, potensi, dan alternatif rencana dan fasilitas yang terkait pengembangan pariwisata. Masyarakat Pulau Gili Labak pada tahap ini kebanyakan masih belum terlibat aktif secara keseluruhan dan juga mempercayakan penuh pada pihak yang tergabung dalam Pokdarwis. Pada tahap ini, masyarakat lokal secara keseluruhan belum memiliki perencanaan yang jelas, terkait mereka yang juga belum paham tentang apa yang harus mereka lakukan. Sosialisasi (pendekatan) juga sudah dilakukan oleh Pokdarwis kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam

tahap ini, namun masih ada beberapa masyarakat yang belum bergerak karena faktor usia dan pengetahuan. Hal ini diperjelas seperti yang disampaikan oleh Bapak Arwiyanto selaku Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Pendekatan sudah pernah dilakukan, waktu pertama dibentuk itu sudah jelas, cuman warga disini masih awam. Waktu persidangan okay, setelah persidangan berubah pikiran, tapi kekompakannya masyarakat disini kompak semua. Kalau ada kegiatan pasti kerja semua, yang penting ada perintah tanpa mengetahui asal usulnya, cuman ya ini dek mereka belum merespon.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan ini masih dilakukan oleh Pokdarwis, dikarenakan kebanyakan dari masyarakat lokalnya yang masih belum mau untuk merencanakan tentang pengembangan yang akan dilakukan. Sehingga pada tahap ini masih sering terjadinya kesalahpahaman. Hal ini diperjelas kembali oleh Bapak Arwiyanto selaku Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Kalau masalah perencanaan masih ada, cuman saya pusing. Pengennya saya ini, kan kekurangan disini masih banyak. Karena disini memang Perdes, tapi ini tanpa dukungan dari kadesnya (kurang mendukung, beda dengan pantai 9). Kalau pantai 9 itu enak, bukan hanya banyak dukungan, memang tanahnya adalah milik negara “tanah pecakon” memang diuntukkan buat Kades untuk dikembangkan. Akibat kepemilikan tanah yang masih dimiliki oleh warga masing-masing, jadi terpakai semua akhirnya timbul gesekan. Tapi tidak semua orang, hanya ada beberapa saja. Pertama dibentuk saya sudah bilang, bahwa saya adalah pemuda disini sebagai tiang atau tonggak, kekuatan saya dari kalian semua, kalau saya salah, silahkan ngomong didepan jangan sungkan-sungkan ayo kita musyawarah, jangan ngomong dibelakang. Ada juga warga yang sangat individual, saya sampe pernah mengeluh, andai saya diberi kesempatan untuk mengatur warga 1 Desa Kombang saya sanggup, dari pada disini yang hanya 38 KK. Warga disini cenderung tidak sejalan, jika tau dikit, langsung mau jadi yang di depan. Tapi keinginan saya Gili Labak harus tetap maju, kerena rencana saya kemarin atau minggu ini saya akan

melaporkan akan dibuat jalan disekililing dan juga kekurangan disini adalah penginapan, karena tamu-tamu yang jauh jika datang disini langsung pulang, karena fasilitas yang masih kurang. Ini sih rencana dari Pokdarwis dek, karena kalo bukan kita sapa lagi yang mau mengkoordinasi buat pengembangan disini.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Hal ini juga terkait munculnya berbagai gesekan yang terjadi sehingga sangat sulit untuk masyarakat lokal terlibat dalam tahap ini, jadi hanya beberapa saja khususnya masyarakat yang telah bergabung di Pokdarwis. Hal ini juga dikarenakan kurangnya koordinasi dari Kepala Desa yang seharusnya mampu memberikan dorongan (motivasi dan arahan) kepada masyarakatnya pada tahap perencanaan ini, sehingga menimbulkan masyarakat lokal di Pulau Gili Labak tidak terlalu peduli dan kurang memperhatikan terkait adanya pengembangan yang sangat potensial untuk dilakukan. Hal terkait kurangnya dukungan dari Kepala Desa juga dijelaskan oleh Bapak Nasah Bandy selaku Camat Talango, yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dari masyarakat sangat antusias untuk mengembangkan, cuman dari kadesnya yang kurang mendukung. Kalau respon mereka sebenarnya positif, cuman ya itu pembinaan atau sosialisasi sebenarnya harus dari desa, cuman Kadesnya ya gitu.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018).

Hal serupa tentang pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Warno selaku Wakil Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengungkapkan bahwa:

“Yang mengelola dan yang mengkoordinir ya remaja disini (Pokdarwis). Karena Kadesnya sendiri kurang perhatian.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018).

Berdasarkan dari berbagai pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pada tahap perencanaan ini masih sepenuhnya bertumpu pada Pokdarwis.

perencanaan pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak juga sudah dilakukan oleh anggota Pokdarwis kepada seluruh masyarakat untuk ikut terlibat dalam perencanaan tersebut. Pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak juga masih dikatakan berada pada tahap perintisan, sehingga sangat diharapkan dan diupayakan untuk seluruh elemen masyarakat diajak untuk ikut serta dalam segala perencanaan yang terkait pengembangan. Salah satunya yaitu bergabung dalam Pokdarwis untuk dapat menjadi satu agar dapat terwujudnya masyarakat yang lebih peduli dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak. Namun, saat ini masih banyak dari masyarakat yang belum semuanya bergabung dalam Pokdarwis.

#### **b. Tahap Implementasi**

Tahap implementasi disini merupakan telah adanya bentuk keterlibatan masyarakat terkait dengan adanya partisipasi dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan pada suatu objek. Pada tahap ini sudah ada beberapa masyarakat di Pulau Gili Labak yang mulai menyadari adanya potensi yang harus dikelola dan dijaga kelestariannya. Pokdarwis juga membuat beberapa program terkait pengembangan untuk melestarikan potensi yang dimiliki dan menjaga lingkungan sekitar untuk tetap bersih. Adanya keterlibatan masyarakat juga karena diarahkan oleh tokoh masyarakat (dalam hal ini adalah Ketua RT) di Pulau Gili Labak untuk terlibat dalam program yang dibuat untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik pada suatu objek.

Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan Bapak Abd. Jalil selaku Ketua RT di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Biasanya kalo ada kegiatan langsung diajak sama saya, atau dipanggil melalui *loudspeaker*, jadi mereka datang semua.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Pada tahap ini keterlibatan masyarakat adalah dengan bergabung pada kegiatan bersih-bersih yang merupakan program yang dibuat oleh Pokdarwis, dan juga ada program penanaman terumbu karang yang juga melibatkan masyarakat lokal untuk bergabung dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Warno selaku Wakil Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengungkapkan bahwa:

“Penanaman terumbu karang, dari wisatawan juga ada, dari Pokdarwis sudah 4 kali penanaman. Kita juga memberdayakan masyarakat yang belum tergabung di Pokdarwis. Karena, untuk penanaman terumbu karang 1 tahun 1 cm, kalau disini cepat, mungkin pengaruh dari kadar airnya (karena disini lebih asin, kadar garam yang tinggi), jadi ini sangat penting untuk dikelola.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Selain kegiatan penanaman terumbu karang, program kegiatan bersih-bersih juga wajib dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan di Pulau Gili Labak demi kenyamanan bersama. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Arwiyanto selaku Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengungkapkan bahwa:

“Disini kami adakan kegiatan bersih-bersih yang diatur oleh Pokdarwis dan atas kemauan masyarakat juga. Rata-rata 3 jam untuk bersih-bersih dengan bayaran 25 ribu (atas permintaan warga). Terkait pendapatan yang sampai dipertanyakan kenapa Gili Labak tidak maju-maju. Disini laut besar (rawan sampah atau ada sampah kiriman). Jadi, pendapatan dari tiket masuk ya dibayarkan untuk kegiatan bersih-bersih itu.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal juga belum sepenuhnya dilakukan secara sukarela untuk menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Hal inilah yang juga menunjukkan bahwa pada dasarnya partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak masih butuh dorongan yang lebih maksimal lagi. Hal ini juga dikarenakan, pada awalnya masyarakat lokal berpikir bahwa dengan adanya pengembangan pariwisata akan menjadi suatu hal yang tidak baik untuk daerahnya, terkait pengetahuan mereka yang masih awam. Namun, setelah dilakukannya beberapa sosialisasi sedikit banyak sudah mulai sadar meskipun semuanya belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut diperkuat kembali dengan pernyataan dari Bapak Arwiyanto selaku Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengungkapkan bahwa:

“Awal-awal yang *booming* itu sampai-sampai lahan-lahan dipakai dan kayu bakar warga dipakai untuk api unggun, akhirnya saya berusaha melaporkan kepada Kades akhirnya dibentuk kelompok, setelah dibentuk kelompok, surat Perdes belum jadi, itu hanya pakai kwitansi aja, jadi bermasalah, sampai-sampai ada anak buah saya yang ditampar oleh TNI AL (karena omongan yang lancang). Waktu itu saya tidak ada disini (karena ada keluarga yang sakit parah jadi ada di Talango). Jadi setelah saya pulang kesini, saya urus surat Perdes jadi keluar tahun 2018 surat Perdes. Jadi mulau adanya kesadaran masyarakat disini, daripada pengunjung merusak lahan disini, jadi di beri peraturan. Setelah dijalankan ada sebagian masyarakat dan pengunjung yang sadar. Sempet ada yang bilang kalo wisata adalah merusak (bagi 90% yang tidak sadar dan 10% yang sadar) akibat adanya pengunjung. Aturan dari terumbu karang (seharusnya melestarikan bagi yang sadar dan sebaliknya). 1 cm membutuhkan 1 tahun (disini cuman lebih cepat, tapi kalo dipelihara).” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas sudah menjadikan salah satu bukti yang lain, bahwa pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak membutuhkan proses dan upaya yang cukup sulit dari beberapa pihak

(dalam hal ini khususnya adalah Pokdarwis selaku kepanjangan tangan dari Disbudparpora). Hampir keseluruhan kegiatan yang terkait pengembangan yang mengatur dan mengkoordinasi adalah Pokdarwis, hal ini juga terkait bahwa anggota Pokdarwis merupakan sebagian dari masyarakat lokal yang ada di Pulau Gili Labak yang dipilih dan memiliki kesadaran wisata. Jadi kebanyakan dari mereka mengerti tentang kondisi di Pulau Gili Labak. Terkait masalah pembayaran pada masyarakat untuk kegiatan bersih-bersih, hal ini dikarenakan supaya seluruh masyarakat lokal tetap mendapatkan penghasilan bagi mereka yang masih pasif. Hal ini juga dikarenakan, ada beberapa aktivitas masyarakat yang harus terhenti demi kenyamanan lingkungan. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Abd. Jalil selaku Ketua RT di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Dulunya sebelum ada wisatawan, masyarakat disini bekerja nelayan mencari ikan teri dan menjemur tiap hari (pendapatan bisa 70-100 ribu/orang). Tapi karena adanya wisata, akhirnya terpaksa diberhentikan (takut mengganggu lingkungan “amis”). Ya karena itu, mangkanya untuk pendapatan ya dibilang tetap (khususnya bagi mereka yang tidak aktif). Masyarakat sih tidak masalah (karena ada pendapatan pengganti lah, ya dari kegiatan bersih-bersih).” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa, masyarakat lokal dalam tahap ini sudah ikut terlibat dalam program-program yang diadakan oleh Pokdarwis. Namun, sebagian besar keterlibatan tersebut juga masih membutuhkan upaya untuk mengajak mereka. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya masyarakat lokal di Pulau Gili

Labak tidak memiliki pengetahuan, sehingga mereka masih butuh seseorang yang dapat mengkoordinasi mereka supaya dapat terlibat.

**c. Tahap *Monitoring* dan evaluasi**

Tahap ini merupakan adanya bentuk partisipasi yang mulai terwujud dalam peran dan posisi masyarakat dalam tahap ini, sehingga adanya nilai dan manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan pariwisata. Pada tahap ini, ada sebagian masyarakat lokal yang mulai menyadari bahwa dengan adanya pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupannya. Sehingga, dari mereka mulai ada kesadaran untuk ikut berperan dalam pengembangan. Salah satu peran yang paling nampak yaitu dengan membuka usaha (warung) untuk menambah pendapatan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pernyataan oleh Bapak Erris selaku masyarakat lokal di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa:

“Saya bahagia sejak ada pariwisata, karena banyak kok keuntungan yang saya peroleh, khususnya ya dalam hal pendapatan. Dulu sebelum ada pariwisata saya ya nelayan mbak, tapi setelah ada wisata saya ya buka usaha ini. Jadi lebih enak, saya gak perlu ke laut, dari usaha ini ya saya sudah dapet penghasilan. Tapi ya tetep saya nyari ikan kalo ada pesenan gitu di warung.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Hal lainnya terkait peran masyarakat pada tahap ini juga dijelaskan oleh Bapak Toni selaku masyarakat lokal di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Kalo saya sih mendukung aja, tapi saya tetap mancing. Soalnya saya hanya punya tegal untuk menanam kelapa, jadi saya masukin kelapa saya ke warung untuk dijual 5000-6000/biji, biasanya sekitar 30-100 biji/setengah bulan. Ya lebih enak ke saya sih, kalo dulu dikeringin dan dijual ke poteran itu dengan harga 3000-4000/biji. Tapi itu masih butuh

perahu buat ngangkut kesana, jadi kalo sekarang karna ada wisata ya saya masukin saja ke warung di depan yang berjualan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).



**Gambar 4.3 Buah Kelapa untuk Disetor ke Warung**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*

Berdasarkan dari pernyataan di atas merupakan pandangan beberapa masyarakat yang ikut berperan dalam kegiatan pariwisata, bahwa dengan adanya pariwisata cukup memberikan kemudahan untuk pekerjaannya. Namun, belum semua masyarakat lokal merasakan manfaat dari adanya kegiatan pariwisata. Hal ini diakibatkan, masih ada beberapa masyarakat lokal yang tetap pada pekerjaan mereka sebagai nelayan ataupun petani. Adapula, ketidakikutsertaan mereka untuk berperan pada tahap ini adalah dikarenakan tidak adanya modal yang cukup untuk mereka membuka usaha, sehingga masih pasrah saja dengan keadaan yang sekarang. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari Bapak Arwiyanto selaku Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengungkapkan bahwa:

“Kalo masalah ke ekonomi disini saya bilang belum merata dek, karena sekarang ini, perekonomian masyarakat yang bertambah adalah mereka yang punya warung, tapi kalau yang tidak punya warung (anggap aja terusik). Kalo sesuai aturan seharusnya tiap-tiap warung perbulan harus

bayar atau dikenakan pajak (masalah kualitas barang dan harga harus dikontrol). Disini kebanyakan mainnya tidak cantik, ada sebagian yang ikut aturan, ada juga yang tidak, misal yang penting laku sendiri (harga dimurahkan). Terus ini lagi masalahnya sebenarnya tamu yang kesini bebas (tidak terikat dengan biro *travel*). Karena, wisata disini terikat dengan biro *travel*. Seharusnya biro *travel* jangan seperti itu (seharusnya diarahkan secara adil/ wisatawan diberi kebebasan untuk memilih). Intinya orang yang buka warung harus ada kenalan dengan biro perjalanan, baru deh rame. Bisa adek liat sendiri kan paling yang rame ya warung bagian timur sana. Ada juga terkait penginapan dek, ada beberapa rumah warga yang juga disewakan tapi masih belum layak, bukannya ndak layak gimana, kalo tempat penginapan kan seharusnya ada toilet, ada kamar mandi. Tapi bagi yang ada modal (ada yang layaklah). Kalo aturan wisata, seharusnya kalo kita kembali ke aturan negara, kalau buat penginapan harus ada ijin, atau laporan dulu. Nah mangkanya saya bilang kalo sulit ekonomi di gili labak sulit untuk merata (karena ada warga yang masih individual).” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Hal serupa juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Abd. Jalil selaku Ketua RT di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Ada penambahan pendapatan, tapi tidak merata bagi semua pelaku usaha/ toko). Untuk pendapatan ya masih stabil, tergantung jumlah wisatawan yang datang.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata masih ada beberapa kendala dan gesekan yang timbul akibat ketidaksejajaran seluruh warga setempat. Sehingga, pada tahap ini meskipun telah ada beberapa yang berperan untuk kegiatan pariwisata yang nantinya dapat memperoleh manfaat ekonomi salah satunya, namun masih saja belum dapat merata ke seluruh aspek masyarakat. Hal inilah yang juga dapat berpengaruh untuk keterlibatan atau peran masyarakat lokal secara keseluruhan sulit untuk berpartisipasi secara aktif, jika masih ada beberapa masyarakat yang sikapnya individual. Data di atas menunjukkan terkait tahapan peran aktif masyarakat lokal di Pulau Gili Labak yang ternyata masih belum

semuanya terlibat. Berikut juga perlu disajikan beberapa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yang telah masyarakat lakukan untuk pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak, baik partisipasi pasif maupun partisipasi aktif dari masyarakat.

#### **a. Partisipasi Aktif**

Partisipasi aktif merupakan peran atau dukungan dari masyarakat terhadap pengembangan yang dilakukan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. Masyarakat di Pulau Gili Labak sudah ada sebagian yang berpartisipasi sangat aktif terhadap pengembangan pariwisata, tetapi lebih cenderung kearah yang masih individual. Namun, adapula dari masyarakat yang juga sudah terlibat secara bersama-sama untuk membantu beberapa program atau pengembangan dari pihak Disbudparpora melalui pembinaan rasa ikut memiliki, seperti dalam hal pembangunan beberapa fasilitas di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, serta kemauan dari mereka untuk membentuk sebuah Pokdarwis yang dibina dari pihak Disbudparpora.

Partisipasi aktif dari masyarakat terkait pengembangan pariwisata juga dijelaskan oleh Bapak Hidayat selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, yang mengatakan bahwa:

“Untuk pengembangan kami langsung mengadakan sosialisasi dan pembinaan tentang sadar wisata kepada masyarakat rutin 1 tahun 2 kali. Dominan menyambut dengan senang hati (*welcome*), mereka sudah mulai sadar bahwa Gili Labak punya potensi yang bisa untuk diandalkan (Gili Labak merupakan objek wisata unggulan, mungkin dari pembinaan yang kita lakukan sehingga mereka sadar bahwa Gili Labak sangat berpotensi). Mereka sudah aktif, konsep kami disaat memberikan bantuan atau mengadakan pembinaan, konsep kami adalah masyarakat dihadirkan dan diundang semua, biar saran dan pembinaan dari kami bisa ditangkap oleh

mereka dan tidak ada bermacam-macam bahasa buat selanjutnya. Salah satunya yaitu mereka membuat pokdarwis, yang diinisiatif dari dinas, karena konsep kami adalah semua destinasi di Kabupaten Sumenep kita bentuk Pokdarwis. Akhirnya SK (Surat Keputusan) Pokdarwis dikeluarkan oleh dinas (mereka ini tangan kanan kami atau kepanjangan tangan kita). Biar saat bersosialisasi lebih mudah. Pokdarwis juga dibentuk atas inisiatif dari dinas. Mereka juga ikut berantusias mendukung proses pengembangan. Misalnya, ikut memelihara infrastruktur yang sudah kita berikan, sadar diri (mereka tanpa disuruh sama kami, timbul merasa memiliki dan berpikiran positif). Mereka juga punya konsep (Pokdarwis), dan mereka kami berdayakan dan diajarkan 1 minggu sekali melakukan kegiatan pembersihan. Namun untuk masyarakatnya ya ndak mungkin, hanya ngikut saja/ sekedar mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh dinas. Contohnya tahun kemarin dinas ngadakan *event* mancing internasional di perairan Gili Labak, dan masyarakat disana ikut mendukung (menyewakan atau meminjamkan perahunya) dan *event* tersebut juga sukses dan merupakan *event* pertama ini yang dilakukan di Gili Labak.” (wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan secara tidak langsung bahwa pada dasarnya masyarakat yang aktif adalah masyarakat yang telah bergabung ke Pokdarwis, untuk masyarakat yang diluar Pokdarwis hanya sekedar mendukung. Maka dari itu, masih sangat diupayakan untuk semua KK yang ada di Pulau Gili Labak dicakup semua untuk tergabung dalam Pokdarwis. Supaya, dengan hal ini dapat mendukung sekaligus mensosialisasi mereka (masyarakat yang belum tergabung) untuk lebih berperan aktif dan peduli terhadap pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Berikut salah satu bukti bahwa ada masyarakat yang aktif dalam membantu pembangunan fasilitas di Pulau Gili Labak yang diberikan atas bantuan dari Disbudparpora.



**Gambar 4.4 Kegiatan Gotong-royong yang dilakukan Masyarakat Lokal untuk Pembangunan Gazebo**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*



**Gambar 4.5 Gazebo dari Disbudparpora**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*



**Gambar 4.6 Pos Kesehatan dan Pelayanan Terpadu dari Disbudparpora**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*

Selain partisipasi aktif dalam hal pembangunan fasilitas dari Disbudparopra, ada beberapa masyarakat lokal yang juga aktif secara perseorangan untuk menyediakan jasa pelayanan kepada wisatawan, seperti persediaan makanan, minuman, musholla, dan toilet. Selain untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung, dari adanya bentuk wujud fisik yang disediakan sebagai peran aktifnya juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mereka khususnya di bidang ekonomi. Hal ini diperjelas oleh Bapak Erris selaku masyarakat lokal di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Saya membuka toko sudah 2 tahun semenjak ada wisata, terus juga itu Menyediakan jasa motor pantai (50 ribu/ setengah jam). Ya kalo ada musyawarah gitu saya selalu ikut, ikut kekompakan. Kalo dari saya ya memberikan pendapat atau usulan seperti, tiket masuk untuk kebersihan, sisanya untuk pembangunan. Terus saya juga ingin membuat penginapan, jadi rumah saya yang disewakan untuk ke tamu.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat lokal yang terus berupaya untuk ikut berperan aktif dalam pengembangan pariwisata guna memperoleh manfaat ekonomi khususnya. Selain bentuk partisipasi yang aktif dari masyarakat tersebut, mereka juga memberikan arahan atau masukan kepada pihak yang mengkoordinasi pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak. Hal ini dikarenakan, dari beberapa masyarakat yang telah berperan aktif mulai merasakan manfaat ekonomi yang cukup baik dari adanya kegiatan pariwisata di Pulau Gili Labak. Hal ini dijelaskan kembali oleh Bapak Erris selaku masyarakat lokal di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Kalo harapan saya mbak, karena sudah merasakan manfaatnya ya Gili Labak untuk terus menjadi pariwisata yang berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat ekonomi, terus berkembang, dan diharapkan tetap hidup wisatanya. Terus masalah akses transportasi juga untuk lebih ditingkatkan. Yang saat ini yang bisa saya lakukan ya pastinya tetap menyediakan kebutuhan wisatawan ya sama tetap aktiflah dalam pemeliharaan disini.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, pada dasarnya ada kemauan dari masyarakat lokal untuk terlibat aktif. Namun, dikarenakan terkadang ada kesalahpahaman yang membuat mereka menjadi enggan, sehingga hanya sebatas mendukung dan mengikuti apa yang dikatakan oleh pihak atas yang terkait. Selain itu, juga dikarenakan faktor usia dan pengetahuan mereka yang masih awam, sehingga membuat mereka terkadang salah persepsi tentang kegiatan pengembangan pariwisata. Hal ini, pastinya perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan untuk terus mengarahkan masyarakat supaya dapat memahami tentang pengembangan pariwisata yang

cukup memberikan manfaat jika dimanfaatkan dan dikembangkan secara bersama.



**Gambar 4.7 Toilet dan Mushollah yang Disediakan oleh Masyarakat**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*



**Gambar 4.8 Penyediaan Air Bersih dari Masyarakat untuk Kebutuhan Wisatawan**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*



### **Gambar 4.9 Motor Pantai yang Disediakan oleh Masyarakat**

*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa partisipasi aktif dari masyarakat lokal masih belum semuanya tercakup dalam proses pengembangan pariwisata. Bantuan pada proses pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak masih ada yang berasal dari pihak eksternal. Selain bantuan dari Disbudparpora, adapula bantuan yang berasal dari beberapa pihak. Hal ini dijelaskan juga oleh Bapak Hidayat selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, yang mengatakan bahwa:

“Gili Labak mulai banyak mendapat bantuan tahun 2014 (dari pemerintah). Infrastruktur yang ada dari dinas seperti, pos kesehatan dan keamanan terpadu, gazebo, jembatan apung, tempat-tempat kuliner. Untuk tahun 2018 lagi *planning* proses lelang, nantinya akan dibangun *diving center* (perlengkapan untuk *snorkeling*). Kami masih tahap bantuan infrastruktur, karena masih sangat dibutuhkan air bersih, penerangan masih pakai tenaga surya dan *diesel* bagi mereka yang mampu. Untuk bantuan yang tidak hanya dari dinas tapi juga dari pihak lainnya seperti dari PT. Santos, BLH, Cipta Karya, BPRS Bhakti Sumekar. Karena juur saja kami tidak semuanya bisa kami anggarkan pada pariwisata.” (wawancara pada tanggal 9 Maret 2018).

Hal serupa juga diperjelas oleh Bapak Abd. Jalil selaku Ketua RT di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Rumah singgah dari PT. Santos. Dari Santos tiap tahun ( sudah 5 tahun bantuan). Kursi dan tikar dari Santos, karena pengeborannya dekat dengan Gili Labak, jadi tiap tahun dapat hasil.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).



**Gambar 4.10 Tempat Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*



**Gambar 4.11 Rumah Singgah dari PT. Santos**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*



**Gambar 4.12 Nama Pulau Gili Labak dari BPRS Bhakti Sumekar**  
*Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018*

#### **b. Partisipasi Pasif**

Partisipasi pasif dari masyarakat merupakan bentuk dukungan yang bersifat tidak langsung, masyarakat disini hanya cenderung melaksanakan perintah dan ikut mendukung untuk pemeliharaan konservasi sumber daya alam dan sekedar timbul kesadaran untuk tidak melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak lingkungan alam. Masyarakat lokal di Pulau Gili Labak dalam hal ini hanya saja mengikuti apa yang diperintahkan oleh pihak atasan (dalam hal ini Disbudparpora dan Pokdarwis). Mereka hanya sekedar terlibat dalam rapat karena diarahkan oleh tokoh masyarakat Pulau Gili labak, tetapi tidak berani untuk berbicara. Masyarakat lokal disini masih cenderung bertumpu pada kelompok yaitu Pokdarwis di Pulau Gili Labak. Hal ini dipertegas oleh Bapak Abd. Jalil selaku Ketua RT di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat disini yang penting ikut, yang aktif ya dari Pokdarwis. Intinya ikut atasan. Arahan kepada masyarakat sudah diberikan, tapi mereka takut untuk berbicara, jadi disampaikan kepada saya dan Pokdarwis, karena mereka bodoh, jadi sangat sulit untuk ikut terlibat

semua lapisan masyarakatnya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung atau banyak yang belum aktif (hanya sekedar berpartisipasi secara pasif). Selain faktor usia dan pengetahuan mereka yang masih awam, hal ini juga dikarenakan masih kurangnya koordinasi dari Kepala desa kepada masyarakat untuk pengembangan, jadi masyarakat masih bertumpu pada Pokdarwis. Pada dasarnya, dukungan dari Kepala Desa juga sangat dibutuhkan untuk memotivasi masyarakatnya. Hal ini terkait pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak mengatasnamakan desa, dan semua pendapatan yang diperoleh masuk ke desa. Namun, karena kurangnya gerak aktif dan pemikiran yang lebih realistis dari Kepala Desa, hal ini membuat para masyarakatnya pun hanya diam saja dan sekedar ikut saja tanpa adanya keinginan untuk lebih maju lagi. Pernyataan ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Arwiyanto selaku Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang menjelaskan bahwa:

“Kades yang kurang aktif untuk mendukung pengembangan pariwisata di Gili Labak ya kalau itu mungkin ada permasalahan dengan salah satu seseorang atau dari dinas itu. Tetapi, kalau dibutuhkan oleh masyarakat tetep hadir. Cuman kalo dihubungi atau ditelpon Kadesnya susah (jarang aktif), karena di rumah posisinya gak ada sinyal. Kalo masalah peduli ya masalah peduli ya namanya Kades ya tetep ikut. Karena pembuatan surat Perdes itu yakan Kades gitu yang menyetujui. Untuk masalah pendapatan itu, yang masuk memang masuk ke Perdes setelah sisanya kebersihan. Kalau masalah dikelola lagi tidaknya kurang tau saya kalau masalah itu dek, dan untuk sosialisasi apa ya, Kades ya itu cuman menyetujui saja dek. Terus masalah pengaturan warga oleh Kades, ya kalau masalah itu dek namanya yang diatur bukan rakyat sedikit kan, kita mengurus anak di rumah tangga ada yang nakal ada yang apa gitu. Jadi mungkin istilahnya di Gili Labak warganya dongo itu. Jadi gimana ya, walaupun mau diapain hanya diam saja. Jadi kadesnya enak itu. Terus masalah member motivasi

atau sosialisasi mungkin Kadesnya tidak berpikir kesana dek. Cuman saya kemrin meminta itu karena banyak keluhan pengunjung karena tidak ada tempat teduh (*homestay*). Saya berbicara sama Kadesnya, tolong di ide ADD (Alokasi Dana Desa) itu anggarkan ke Gili Labak untuk membuat *homestay*. Jadi, keluhan tamu itu mau menikmati suasana di Gili Labak tidak ada tempat teduh, jadi jauh-jauh dari Jakarta dari luar itu tidak ada penginapan yang layak itu. Kemaren iui dari dinas kesehatan, Gili Labak harus mempunyai *homestay* paling sedikit 30 unit, dia ngomong langsung sama Kades, tapi gak tau tanggapan Kadesnya itu gimana itu gak tau. Saya berpikir itu, Kades kan ngomong kalau mau beli *homestay* yang punya orang Pameksan, mau dibeli. Tapi kata saya jangan itu doang, harus nambah itu.” (wawancara pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, dari Kadesnya sendiripun masih sangat pasif dan masih butuh dorongan atau arahan dari Pokdarwis. Kades Pulau Gili Labak juga dikenal kurang partisipatif terhadap pengembangan pariwisata, sehingga sangat sulit untuk memberikan arahan atau motivasi kepada rakyatnya, jika dari pihak Kadesnya juga masih butuh diberikan arahan. Hal ini bukan kearah tidak paham tentang pariwisata, melainkan lebih kearah kurangnya kepedulian untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain masalah kurangnya dukungan dari motivasi, hal ini juga dikarenakan faktor pengetahuan mereka yang kurang pengalaman sehingga kadang engga untuk berperan aktif dalam pengembangan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Nasah Bandy selaku Camat Talango, yang menjelaskan bahwa:

“Dari saya sendiri sudah menawarkan untuk menjual *souvenir*, saya bilang nanti saya yang buat, cuman nanti sapa yang mau koordinasi, cuman mereka belum ada respon. Mungkin karena, mereka masih belum kesana pemikirannya. Saya juga pernah bilang ke Kadesnya, dana ADD (dana desa min 1 M), sebenarnya itu bisa digunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan. Kenapa tidak digunakan untuk pengembangan Gili Labak. Alasannya, disana sudah sering dapat dana dari Santos, tapi tetap ndak boleh seperti itu mestinya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018).

Hal serupa yang dikaitkan dengan pernyataan bahwa kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat lokal di Pulau Gili Labak juga diperjelas oleh Saudara Steven selaku wisatawan yang berkunjung ke Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Untuk respon masyarakat bagi saya ya masih belum sepenuhnya aktif, bisa dikatakan 50% apatis, ya agak cuek gitu kaya kurang *welcome* sama pengunjung. Karena kalo di daerah wisata biasanya kan suka nawarin gitu, ini kesannya biasa saja sih. Malah waktu mau ke toilet pun masih harus cari orangnya ini kemana. Kalo ketemu, mereka ya hanya senyum biasa aja. Masyarakatnya harusnya ini lebih dibentuk atau dididik kali ya, biar lebih aktif dan semuanya mendukung. Karena kayanya masih pasif mereka gak ada usaha untuk gimana gitu. Karena, di tempat wisata selain bertani ya bisa aja kaya jualan apa gitu ya biar rame. Tapi gak tau ya, mungkin karena kendala dana atau pola pikirnya yang masih kurang.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Hal serupa juga diperjelas oleh Saudara Hasanuddin selaku wisatawan lain yang juga berkunjung ke Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Ya sebenarnya untuk masyarakatnya sebagian ramah, tapi masih ada yang terkesan apatis gitu. Masyarakatnya kaya terkesan cuek dan sibuk pada aktifitas masing-masing, kecuali untuk sebagian mereka yang punya usaha (warung).” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

## **2. Faktor Penghambat dan Pendorong Masyarakat Lokal untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep**

Berdasarkan fenomena yang yang ditemukan, dapat diketahui bahwa ternyata ada beberapa faktor yang menghambat dan sekaligus yang mendorong untuk masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Faktor penghambat disini merupakan terhalangnya atau tidak adanya keinginan untuk serta berperan aktif dalam pengembangan pariwisata di

Pulau Gili Labak. Hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari dalam ataupun luar masyarakat itu sendiri., namun tidak semua yang menghambat tersebut akhirnya menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak. Adapula dari sisi pendorongnya yang mampu membuat masyarakat untuk turut serta mendukung dan berperan aktif dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak, salah satunya dengan melalui dibentuknya Pokdarwis Gili Labak yang mampu menjadi koordinator bagi masyarakat yang belum aktif.

#### **a. Faktor Penghambat**

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dapat dijelaskan bahwa, hal yang menghambat sebagian masyarakat untuk tidak ikut dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak karena faktor usia dan pengetahuan mereka yang sangat awam terhadap perubahan yang mulai terjadi terkait pengembangan, serta kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak atasan. Sosialisasi yang sifatnya berkelanjutan juga sangat penting untuk dilakukan dalam hal memberikan arahan masyarakat yang masih awam. Hal ini dikarenakan, dengan adanya sosialisasi sedikit banyak akan membantu masyarakat untuk belajar dan mengetahui pengetahuan terkait pengembangan pariwisata. Sosialisasi juga harus diimbangi dengan berbagai pelatihan-pelatihan terkait potensi yang akan dikembangkan, supaya dapat memberi pengetahuan dan mengasah keterampilan masyarakat untuk terlibat mengelola potensi yang ada.

Selain itu, juga karena belum adanya motivasi dari dalam diri masyarakat itu sendiri serta kurangnya dukungan juga dari Kepala Desa yang seharusnya berlaku sebagai koordinator di Pulau Gili Labak. Motivasi ini juga sangat penting dan

akan menentukan untuk masyarakat ikut berpartisipasi atau tidak. Hal ini dikarenakan, motivasi merupakan hal yang paling mendasar, jika motivasi tersebut sudah tidak ada dalam diri masyarakatnya, maka otomatis masyarakat juga tidak mau untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak.

Berdasarkan fenomena yang ada, sebenarnya sosialisasi sudah dilakukan dari berbagai pihak terkait, namun karena memang motivasi masyarakatnya yang masih kurang untuk terlibat dalam pengembangan. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Hidayat selaku Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, yang mengatakan bahwa:

“Ya karena faktor pengetahuan juga ya, karena rata-rata disana masyarakatnya tidak sekolah. Karena ada masyarakat yang belum mengerti, sehingga mudah diprovokasi (ada yang memprovokasi) kadang dari dalam atau dari luar (menyusup atau masyarakat pendatang). Terus mereka juga belum memahami tentang pariwisata sehingga mudah dipengaruhi. Ya untuk menindaki hal tersebut kami dari pihak dinas ya kami melalui Pokdarwis (*sharing*), meskipun kami jarang kesana, kami komunikasi lewat hp. Jadi kuncinya masyarakat masih bertumpu pada Pokdarwis.” (wawancara dilakukan pada tanggal 9 Maret 2018).

Hal terkait masih kurangnya pengetahuan juga diperjelas oleh Bapak Abd. Jalil selaku Ketua RT di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak terlibat ya karena faktor umur, mereka hanya ikut saja (kurang pengalaman dan pengetahuan).” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Hal serupa juga diperjelas langsung oleh Bapak Toni selaku masyarakat lokal di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang menyatakan bahwa:

“Iya saya sebenarnya mendukung saja, tapi hanya ikut berpartisipasi secara pasif ya, intinya apa kata RT, karena saya tidak bisa aktif . Saya hanya orang awam tidak sekolah mbak. Saya juga tidak bisa membantu. Saya serahkan kepada yang muda saja (Pokdarwis). Paling saya ya hanya ikut bersih-bersih. Ya sosialisasi sudah dilakukan sekitar 3 kali kayaknya, tapi ya tetep ngikut aja, saya tetap tidak bergabung (tidak aktif). Tadinya saya mau buka warung, tapi sama anak dilarang, karena sudah tua, jadi dibiayai anak saya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan dari data di atas dapat dijelaskan bahwa faktor usia dan pengetahuan menjadi hal yang paling mendasar yang menimbulkan faktor penghambat untuk masyarakat ikut berpartisipasi pada pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Hal tersebut diperkuat lagi oleh Bapak Arwiyanto selaku masyarakat lokal di Pulau Gili Labak yang berperan sebagai Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengungkapkan bahwa:

“Sebenarnya karena faktor umur, karena Pokdarwis diambil oleh saya adalah tokoh pemudanya, tapi yang sepu tetap dibutuhkan sebagai penasehat. Ya untuk masalah belum dicakup semua, sebenarnya udah saya sosialisasikan. Sudah pernah dilakukan, waktu pertama dibentuk itu sudah jelas, cuman warga disini masih awam, waktu persidangan *okay*, setelah persidangan berubah pikiran, tapi kekompakannya masyarakat disini kompak semua sebenarnya, cuman mereka belum merespon. Intinya ya gitu dek, kurang partisipasi karena faktor umur dan pengetahuan.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

#### **b. Faktor Pendorong**

Masyarakat lokal dikatakan sebagai tuan rumah atas objek yang akan dikembangkan sangat diperlukan dalam proses pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan, jika adanya rasa kepedulian dari seluruh lapisan masyarakat lokal terhadap pengembangan, akan memberikan

hasil yang maksimal dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan tersebut. Pengikutsertaan dari beberapa masyarakat lokal di Pulau Gili Labak itu berupa penyediaan warung yang menyediakan makanan dan minuman, toilet, musholla, dan penyediaan *homestay* (bagi yang rumahnya layak untuk disewakan).

Keikutsertaan mereka dalam pengembangan belum seluruhnya ikut andil dalam pengembangan secara aktif. Namun, dengan adanya faktor motivasi yang timbul dari beberapa masyarakat yang membangun kesadaran dan keinginan masyarakat terlibat lebih mendalam terkait pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak. Adapun mengenai faktor pendukung masyarakat untuk terlibat diperjelas oleh Bapak Nasah Bandy selaku Camat Talango, yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat Gili Labak semenjak ada wisata ya menyediakan tempat menginap (*homestay*) rumah mereka untuk ditempati, awal-awal tidak dikenakan tarif, karena namanya masyarakat desa, jika ada tamu yang kemalaman dipersilahkan untuk menginap di rumahnya. Cuman sekarang sudah dikenakan tarif 250 ribu/malam untuk 1 rumah.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 Maret 2018).

Hal tersebut juga diperjelas oleh Bapak Abd. Jalil selaku Ketua RT di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengatakan bahwa:

“Iya, karena ada wisata akhirnya ya ada beberapa masyarakat yang termotivasi untuk menyediakan tempat penginapan, mereka menyewakan dengan harga 250 ribu. Ya atas inisiatif sendiri dan mereka serempak untuk penetapan tarif harganya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret).

Hal serupa juga diperjelas oleh Bapak Erris selaku masyarakat lokal di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengungkapkan bahwa:

“Ya yang mendorong saya untuk berpartisipasi sebenarnya inisiatif dari diri sendiri, ya untuk menambah pengalaman sekaligus memperbaiki perekonomian. Yang tadinya nelayan (harus berlayar ke tengah), semenjak ada wisata dan wisatawan datang, pendapatan saya bisa dari buka toko, intinya

saya senang dengan adanya wisata.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya yang menjadi hal untuk mendorong sebagian masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata adalah adanya motivasi yang timbul dalam diri masyarakat. Motivasi tersebut mampu mendorong atau menjadi penggerak kepedulian bagi masyarakat yang sudah aktif untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam hal memperoleh pendapatan. Selain itu juga dari adanya kepedulian, karena bagi masyarakat yang aktif dengan adanya kegiatan pengembangan pariwisata lingkungannya menjadi semakin lebih baik dan terawat. Hal ini diperkuat kembali dari pernyataan oleh Bapak Erris selaku masyarakat lokal di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, yang mengungkapkan bahwa:

“Semenjak ada pengembangan yang lingkungan disini lebih terjaga dan teratur. Jadi senang saya liatnya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Hal serupa juga diperjelas lagi oleh Bapak Warno selaku Wakil Ketua Pokdarwis di Pulau Gili Labak, yang mengatakan bahwa:

“Kalau dulu jujur saja masyarakat ya termasuk saya sendiri tidak peduli lingkungan, intinya yang penting kerja. Tapi, karena ada pengembangan dan ada wisatawan ya kita tata dan dirawat lingkungannya biar nyaman ke wisatawannya. Masyarakat ya juga tahu bahwa ini potensi, akhirnya mereka tahu dan menjaganya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 10 Maret 2018).

Berdasarkan dari pernyataan di atas juga dapat dikatakan bahwa, dengan adanya pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep selain memberikan dampak ekonomi juga memberikan dampak pada lingkungannya. Sehingga hal tersebut, sedikit banyak dapat membantu

masyarakat lokal dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Maka dari itu, masih sangat dibutuhkan keterlibatan penuh dari masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak menjadi pariwisata yang berkelanjutan.

### **C. Analisis dan Interpretasi**

#### **1. Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep**

Pulau Gili Labak merupakan salah satu pulau kecil yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura. Pulau Gili Labak dapat disebut sebagai salah satu objek wisata baru di Kabupaten Sumenep yang menawarkan wisata bahari dan saat ini mulai dikembangkan. Pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep membutuhkan upaya yang lebih maksimal dari berbagai pihak yang terkait pengembangan. Hal ini dikarenakan, masih banyaknya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan di Pulau Gili Labak untuk memenuhi setiap kebutuhan wisatawan maupun masyarakat sekitar seperti misalnya yang paling menonjol adalah persediaan air bersih dan listrik. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan suatu objek wisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep adalah dengan adanya partisipasi masyarakat lokal.

Partisipasi dari masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak. Hal ini dikarenakan, dengan adanya keterlibatan masyarakat lokal sebagai tuan rumah yang

mampu berperan atau berpartisipasi aktif dalam pengembangan yang dilakukan, maka akan mampu mewujudkan pengembangan pariwisata yang layak dalam beberapa aspek seperti aspek ekonomi dan lingkungan. Peningkatan partisipasi aktif dari masyarakat juga merupakan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat untuk berperan atau berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan pariwisata, yang nantinya juga berorientasi pada pencapaian hasil yang akan diperoleh oleh masyarakat. Proses peningkatan peran atau partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak terdiri atas, tahap perencanaan, tahap implementasi, dan tahap *monitoring* atau evaluasi:

**a. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan disini menunjukkan sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam proses pengembangan pariwisata yang berkaitan dengan adanya identifikasi terhadap masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, analisis dan peramalan terhadap kondisi lingkungan di masa mendatang, dan pengembangan alternatif rencana dan fasilitas (Sunaryo, 2013:222-223). Pada tahap ini, masyarakat di Pulau Gili Labak masih dapat dikatakan belum mampu terlibat aktif secara keseluruhan dalam mengidentifikasi setiap masalah atau gesekan yang muncul, dalam melakukan pengembangan dari adanya potensi maupun dalam hal lainnya yang terkait dengan pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Hal ini dikarenakan, masih minimnya pengetahuan

dan pengalaman yang berpengaruh pada rendahnya partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak untuk membuat perencanaan terkait pengembangan.

Masyarakat Pulau Gili Labak pada tahap ini kebanyakan masih belum terlibat aktif secara keseluruhan dan juga mempercayakan penuh pada pihak Pokdarwis dan pihak Disbudparpora. Secara teori, tahap ini diartikan adanya keterlibatan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan, potensi, dan alternatif rencana dan fasilitas yang terkait pengembangan pariwisata. Namun, pada kenyataannya, di tahap ini masyarakat lokal di Pulau gili Labak masih dikatakan belum terlalu peka terhadap pengembangan pariwisata yang mulai direncanakan oleh pihak Disbudparpora yang diawali dengan pembentukan Pokdarwis (sebagai kepanjangan tangan) untuk mengkoordinasi di lapangan. Hal ini juga dikarenakan, kurangnya dukungan yang totalitas dari tokoh masyarakatnya (Kepala Desa) untuk menggerakkan dan mengarahkan seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pengembangan di Pulau Gili labak Kabupaten Sumenep. Bahkan dari Kadesnya juga masih acuh tak acuh terhadap pengembangan, sehingga belum ada rencana strategis yang jelas untuk proses pengembangan pariwisata.

Sosialisasi (pendekatan) sebenarnya sudah dilakukan oleh Pokdarwis selaku kelompok yang dibuat dan dipercayakan untuk mengkoordinasi pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, bahkan dari Disbudparporanyapun juga telah memberikan sosialisasi

kepada masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan, masih ada beberapa masyarakat yang belum tergerak sama sekali untuk terlibat dalam perencanaan karena alasan faktor usia dan pengetahuan, serta kurangnya pengalaman.

#### **b. Tahap Implementasi**

Tahap ini menunjukkan sejauh mana bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata (Sunaryo, 2013:222-223). Pada tahap ini, sebagian dari masyarakat di Pulau Gili Labak sudah mulai ada yang menyadari tentang adanya potensi yang dimiliki di daerahnya. Secara teori, pada tahap ini merupakan adanya bentuk keterlibatan masyarakat terkait dengan adanya partisipasi dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan pada suatu objek.

Pada tahap ini sudah ada beberapa masyarakat di Pulau Gili Labak yang mulai menyadari adanya potensi yang harus dikelola dan dijaga kelestariannya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Pokdarwis di Pulau Gili Labak pada tahap ini juga sudah mulai membuat beberapa program terkait pengembangan untuk melestarikan potensi yang dimiliki dan menjaga lingkungan sekitar untuk tetap bersih. Adapun beberapa program kegiatan yang dibuat oleh Pokdarwis pada tahap ini adalah program penanaman terumbu karang yang dilakukan setiap bulan untuk melestarikan potensi dan kegiatan bersih-bersih yang dilakukan setiap hari Jumat – Sabtu. Adanya keterlibatan masyarakat juga karena diarahkan oleh tokoh masyarakat (dalam hal ini adalah Ketua RT) di Pulau

Gili Labak untuk terlibat dalam program yang dibuat untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik pada suatu objek. Namun tetap saja, pada tahap ini masyarakat masih butuh diarahkan oleh beberapa pihak semaksimal mungkin untuk tergerak berkontribusi dalam pengembangan.

**c. Tahap *Monitoring* dan evaluasi**

Tahap ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi masyarakat yang sudah terwujud dalam peran aktif mereka pada pengembangan (Sunaryo, 2013:222-223). Pada tahap ini, sudah mulai adanya kesadaran dari beberapa masyarakat lokal di Pulau Gili Labak tentang manfaat yang akan diperoleh dari adanya kegiatan pariwisata. Beberapa masyarakat sudah mulai beranggapan bahwa dengan adanya pengembangan pariwisata di daerahnya sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai salah satu langkah awal yang baik untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat setempat. Salah satunya adalah dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan ekonomi melalui lowongan kerja yang tersedia.

Secara teori, pada tahap ini menunjukkan adanya bentuk partisipasi masyarakat yang mulai terwujud dalam peran dan posisi masyarakat dalam tahap *monitoring* atau evaluasi serta memperoleh nilai manfaat secara ekonomi maupun sosial budaya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Keterlibatan yang mulai muncul pada tahap ini adalah adanya peran aktif dari beberapa masyarakat di Pulau Gili Labak yang paling utama adalah dengan membuka usaha (warung) yang menyediakan segala kebutuhan wisatawan

seperti makanan, minuman, sabun, obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Selain itu, juga ada beberapa masyarakat yang membuka warung tersebut membangun toilet dan musholla untuk menunjang kebutuhan wisatawan, hingga penyediaan tempat penginapan yang juga disediakan oleh masyarakat lokal untuk wisatawan yang ingin menginap di Pulau Gili Labak. Adanya keterlibatan masyarakat pada tahap ini dikarenakan, masyarakat mulai sadar untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki di daerahnya sebagai sumber pendapatan. Namun keterlibatan masyarakat pada tahap ini dapat disebut hanya sebagai pendukung dari adanya pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan, masyarakat di Pulau Gili Labak belum mampu mengelolah secara maksimal dari potensi yang dimiliki untuk berperan sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan terkait proses peningkatan peran atau partisipasi masyarakat dalam pengembangan dapat disimpulkan bahwa, alasan faktor usia, pengalaman dan pengetahuan yang sangat memicu mereka untuk tidak terlibat. Awamnya masyarakat di Pulau Gili Labak juga menimbulkan mereka tidak terlalu berpikir secara realistis tentang pemanfaatan yang ada jika pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara optimal. Hal ini juga dikarenakan kurangnya peran aktif dari Kepala Desanya untuk memotivasi masyarakatnya kearah yang lebih baik, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang diakibatkan adanya kesalahpahaman antara pihak yang satu dengan yang lain. Akibat

dari hal inilah yang juga menimbulkan masih ada beberapa masyarakat lokal di Pulau Gili Labak belum sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan, namun adapula yang masih ikut terlibat secara pasif. Pada dasarnya ada partisipasi, namun masih belum semuanya ikut terlibat dan masih diwakili oleh Pokdarwis selaku kelompok yang mengkoordinasi.

Berikut penjelasan berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan terkait bentuk-bentuk partisipasi masyarakat baik yang secara partisipasi aktif dan partisipasi pasif dari masyarakat:

**a. Partisipasi Aktif**

Partisipasi aktif dalam hal ini artinya dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara langsung untuk mendukung pengembangan pariwisata (Suswantoro, 2004:85). Partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat lokal di Pulau Gili Labak masih sebatas memberikan fasilitas pendukung dalam pengembangan pariwisata untuk kebutuhan wisatawan (warung makanan dan minuman, toilet, mushollah, dan penginapan). Masyarakat di Pulau Gili Labak sudah ada sebagian yang berpartisipasi sangat aktif terhadap pengembangan pariwisata, tetapi dapat disebut sebagai masyarakat aktif yang cenderung kearah yang masih individual. Namun, adapula dari masyarakat yang juga sudah terlibat secara bersama-sama untuk membantu beberapa program atau pengembangan dari pihak Disbudparpora melalui pembinaan rasa ikut memiliki, seperti dalam hal pembangunan beberapa fasilitas di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep,

serta kemauan dari mereka untuk membentuk sebuah Pokdarwis yang dibina dari pihak Disbudparpora.

Partisipasi aktif yang ditunjukkan pada masyarakat di Pulau Gili Labak juga masih banyak dari masyarakat yang telah bergabung ke Pokdarwis. Hal ini dikarenakan, masih sulitnya untuk mencakup seluruh aspek masyarakat untuk terlibat aktif, sehingga cenderung yang berperan aktif adalah dari Pokdarwisnya. Namun, dalam hal ini Ketua Pokdarwis sudah berencana dan mengupayakan untuk mencakup seluruh masyarakat untuk ikut tergabung dalam Pokdarwis, dan rencana tersebut akhirnya terlaksana dengan melakukan berbagai sosialisasi dan pengarahan yang lebih baik. Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan akhirnya semua masyarakat (berdasarkan jumlah KK) telah bersedia untuk bergabung dalam Pokdarwis dan bersedia untuk saling bergotong-royong dari setiap kegiatan yang akan dilakukan terkait pengembangan di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.

Masyarakat di Pulau Gili Labak ada juga yang aktif karena termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Namun terkadang ada yang salah dari cara mereka untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. Misalnya seperti, yang terlalu individual, kurangnya menjalin kesepakatan dengan yang lain, dan hanya semata-mata untuk memonopoli usaha jasa yang dibuka karena memiliki modal (dana) yang cukup besar untuk mendukung pengembangan. Namun, hal ini masih dipandang salah oleh Pokdarwis,

jika seperti itu sama halnya tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat lainnya yang belum aktif dan tidak memiliki modal.

#### **b. Partisipasi Pasif**

Partisipasi pasif disini dapat diartikan sebagai dukungan dari masyarakat yang bersifat tidak langsung (Suswantoro, 2004:85), masyarakat hanya cenderung sekedar melaksanakan perintah dari atasan. Masyarakat lokal di Pulau Gili Labak dalam hal ini hanya saja mengikuti apa yang diperintahkan oleh pihak atasan (dalam hal ini Disbudparpora dan Pokdarwis). Mereka hanya sekedar terlibat dalam rapat karena diarahkan oleh tokoh masyarakat Pulau Gili Labak, tetapi tidak berani untuk berbicara maupun memberikan pendapat mereka terkait pengembangan yang dilakukan. Masyarakat lokal disini juga masih cenderung bertumpu pada kelompok yaitu Pokdarwis di Pulau Gili Labak.

Partisipasi pasif dari masyarakat lokal di Pulau Gili Labak juga dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mereka tentang kegiatan pariwisata serta rendahnya motivasi dalam diri untuk memberikan kontribusi yang baik dalam kegiatan pariwisata. Hal ini juga dipicu karena masyarakat di Pulau Gili Labak rata-rata masih awam dan kurang diarahkan dari Kepala Desanya selaku seseorang yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan masyarakatnya yang lebih baik. Kepala Desa di Pulau Gili Labak seharusnya mampu memberikan dorongan bagi masyarakatnya, bukan hanya membiarkan masyarakatnya begitu saja dan dipasrahkan pada satu pihak saja. Jadi

karena hal inilah, yang juga menyebabkan masyarakat hanya pasrah dan mengikuti apa yang diarahkan dari Pokdarwis. Hal ini dikarenakan, mereka merasa tidak mampu untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata yang sebelumnya mereka tidak memahaminya.

## **2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep**

Persepsi masyarakat lokal pada pengembangan pariwisata juga akan berpengaruh pada cara masyarakat untuk berpartisipasi. Persepsi masyarakat lokal yang positif cenderung akan mendukung terhadap kegiatan yang terkait dengan pengembangan pariwisata, sedangkan jika masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap kegiatan yang terkait dengan pengembangan pariwisata maka akan memicu rendahnya bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hal ini juga terjadi pada masyarakat lokal di Pulau Gili Labak terkait partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata di daerahnya. Adapun hal-hal yang berpengaruh pada bentuk partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak juga dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong dalam berpartisipasi diantaranya sebagai berikut:

### **a. Faktor Penghambat**

Pada dasarnya, adanya partisipasi aktif dari masyarakat lokal sangat penting dan dibutuhkan untuk keberlangsungan pengembangan pariwisata yang dilakukan guna menjadi tempat wisata yang mampu

memenuhi kebutuhan wisatawan untuk berwisata. Namun, hal tersebut tidak demikian terjadi pada partisipasi masyarakat di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep untuk sepenuhnya dapat berperan aktif. Beberapa faktor yang memicu faktor penghambat masyarakat untuk tidak berpartisipasi adalah adanya hambatan yang sifatnya internal maupun eksternal.

Tosun (2000:615) mengidentifikasi tiga hal utama yang menjadi faktor penghambat untuk masyarakat berpartisipasi dalam mendukung proses pengembangan, yang pertama yaitu adanya keterbatasan operasional (pemusatan administrasi publik dalam bidang pariwisata, kurangnya koordinasi dan kurangnya informasi). Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dapat dijelaskan bahwa, hal yang menghambat sebagian masyarakat untuk tidak ikut dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak karena kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak atasan, serta kurangnya dukungan dari Kepala Desa yang seharusnya berlaku sebagai koordinator di Pulau Gili Labak. Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, sehingga dari hal inilah yang terkadang membuat beberapa masyarakat (khususnya yang sudah lanjut usia sekaligus awam) bingung tentang apa yang harus dilakukan untuk berkontribusi dalam kegiatan pengembangan pariwisata yang terjadi. Sehingga dari hal inilah yang menyebabkan masyarakat terhambat untuk ikut terlibat

dalam kegiatan pariwisata di Pulau Gili Labak, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pengembangan pariwisata.

Kedua, keterbatasan struktural (kurangnya keahlian, kurangnya peraturan yang sesuai, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan kurangnya sumber-sumber pendanaan). Pada keterbatasan struktural juga terjadi di Pulau Gili Labak dikarenakan, faktor usia (rata-rata berusia 50 tahun keatas), kurangnya pengalaman karena masyarakatnya tinggal di daerah terpencil, dan rendahnya pengetahuan masyarakat yang sangat awam terhadap perubahan yang mulai terjadi terkait pengembangan. Minimnya motivasi dan awamnya masyarakat di Pulau Gili Labak untuk berkontribusi dalam pengembangan dapat memberikan celah besar bagi orang-orang diluar Pulau Gili Labak untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan yang cukup baik, misalnya adanya peranan aktif dari berbagai orang yang berasal dari luar Pulau Gili Labak untuk membuat paket wisata dan ditawarkan melalui media elektronik maupun WOM (dalam hal ini adalah biro perjalanan). Namun, hal tersebut tidak disadari oleh masyarakat lokal di Pulau Gili Labak bahwa sebenarnya masyarakat di Pulau Gili Labak hanya menjadi fasilitas penunjang dari pelaku utama (biro perjalanan) yang mampu mempromosikan Pulau Gili Labak dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari masyarakat setempat. Sehingga hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Gili Labak belum meningkat secara signifikan. Hal tersebut dikarenakan,

banyaknya faktor-faktor yang memicu masyarakat lokal untuk tidak terlibat secara dominan dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak.

Ketiga, adalah keterbatasan kebudayaan (kapasitas yang terbatas dalam masyarakat miskin, dan sikap apatis serta tingkat kesadaran yang rendah dalam komunitas lokal). Dalam hal ini masyarakat di Pulau Gili Labak juga belum adanya motivasi dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang sebenarnya sadar dan cukup memahami untuk terlibat yang diperoleh berdasarkan sosialisasi yang dilakukan, akan tetapi lebih memilih untuk menyerahkan sepenuhnya saja kepada Pokdarwis (selaku remaja-remaja yang dinilai mampu untuk hal pengembangan).

#### **b. Faktor Pendorong**

Faktor pendorong bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata adalah dengan adanya atau munculnya berbagai macam kebutuhan yang sifatnya hirarki. Salah satunya adalah dengan adanya kebutuhan dasar fisiologis (fisik), yang merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi kerana berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dan untuk pemenuhannya tidak dapat ditunda karena merupakan pemenuhan yang paling mendesak. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diantaranya ada kebutuhan pakaian (sandang), makanan dan minuman (pangan), tempat tinggal (papan), istirahat, dan lain sebagainya (Maslow dalam Minderop, 2010:48-49).

Berdasarkan hasil dilapangan menunjukkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep masih sangat didukung karena adanya motivasi dari beberapa masyarakat yang menginginkan pulaunya yang kecil menjadi sebuah Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang cukup diminati oleh wisatawan, sehingga adanya perputaran ekonomi yang baik untuk pengembangan. Adanya pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak juga menjadi faktor yang memicu sebagian masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Pada dasarnya yang memicu sebagian masyarakat lokal di Pulau Gili Labak untuk ikut berpartisipasi pada pengembangan yaitu karena motif kebutuhan dasar dari beberapa masyarakat yang menginginkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Namun, partisipasi masyarakat yang menjadi faktor pendorong untuk berkontribusi hanya sebatas pendukung, belum mampu berperan sebagai pelaku utama yang mampu memperoleh manfaat ekonomi yang memiliki pertumbuhannya yang signifikan.

Berdasarkan motif inilah yang mampu mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam setiap kegiatan pariwisata yang dilakukan. Selain itu juga dari adanya kepedulian, karena bagi masyarakat yang aktif dengan adanya kegiatan pengembangan pariwisata lingkungannya menjadi semakin lebih baik dan terawat. Selain kebutuhan dasar yang menjadi faktor pendorong mereka untuk berpartisipasi dalam

pengembangan, adapula sesuatu yang diharapkan dari masyarakat lokal jika Pulau Gili Labak dikembangkan. Adapun harapan dari masyarakat tersebut adalah sebatas untuk memperbaiki Pulau Gili Labak menjadi pulau yang lebih maju lagi. Hal ini misalnya dalam hal pemenuhan sarana, prasarana untuk menunjang kebutuhan masyarakatnya sekaligus wisatawan. Seperti halnya, persediaan air bersih, listrik, fasilitas pendidikan bagi putra putri mereka, dan fasilitas kesehatan yang lebih memadai., serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang membuat kehidupan masyarakat lokal di Pulau Gili Labak lebih sejahtera.

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep pada dasarnya adalah salah satu objek wisata yang memiliki potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Jika potensi yang ada di Pulau Gili Labak mampu dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal oleh seluruh *stakeholders* yang terkait didalamnya, maka Pulau Gili Labak akan menjadi sebuah objek wisata yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di daerahnya. Namun pada kenyataannya, Pulau Gili Labak masih dapat dikatakan belum mampu dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal khususnya dari masyarakat lokalnya sebagai tuan rumah atas objek yang dimiliki, sehingga dari hal inilah pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak masih belum memberikan kontribusi ekonomi secara signifikan kepada masyarakat

lokal. Hal ini dikarenakan, kurangnya kesadaran diri dan antusias dari masyarakat lokal untuk berkontribusi atau berpartisipasi secara maksimal, serta masih rendahnya pemikiran (awam) masyarakat untuk menjadikan potensi yang ada sebagai sumber pendapatan yang cukup baik dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep.

Hasil penelitian yang saat ini dapat disebutkan cukup memberikan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang saat ini dengan penelitian yang terdahulu pada dasarnya memiliki persamaan topik yang cukup spesifik yaitu tentang partisipasi masyarakat pada pengembangan pariwisata. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan diperoleh oleh peneliti dapat disebutkan bahwa partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak masih kurang optimal dan belum sepenuhnya berkontribusi terhadap pengembangan potensi yang ada untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini bukan dikarenakan hanya rendahnya kesadaran masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor usia dan pendidikan masyarakat, namun juga kurangnya koordinasi dari pihak yang berwenang (khususnya pihak dari tingkat desa, yaitu Kepala Desa) untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakatnya untuk mampu memanfaatkan kegiatan pengembangan pariwisata secara optimal demi memperbaiki perekonomian di daerahnya. Hal tersebut

cukup berbeda dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti terkait partisipasi masyarakat.

Nawawi (2013), penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata pantai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kontribusi masyarakat terhadap pengelolaan wisata Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis cukup memberikan bukti yang sangat baik dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan yang dilakukan. Partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari keikutsertaan untuk bergabung pada suatu koperasi sebagai wadah masyarakat yang ada di pesisir Pantai Depok. Masyarakat juga memiliki kesadaran diri yang cukup baik, sehingga mereka saling bekerja sama untuk melakukan kegiatan pengelolaan yang cukup kompleks, seperti adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan Pantai Depok yang tidak hanya pada masalah pengelolaan sampah, tetapi juga mengenai pembuangan limbah cair, daur ulang sampah, pengadaan air bersih, dan evaluasi lingkungan.

Praselia (2015), penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha ekowisata berbasis pantai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagian besar sudah terlibat langsung dalam proses pengembangan usaha ekowisata di Kota Probolinggo. Bentuk partisipasi masyarakatnya sebagian besar juga telah didominasi oleh masyarakat sekitar yang memahami tentang pengembangan ekowisata. Adanya

kegiatan pengembangan juga mampu mendorong sebagian besar dari masyarakatnya ikut berperan aktif dalam pengembangan ekowisata. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, kesadaran diri masyarakat sekitar cukup tinggi terhadap pengembangan, sebagian masyarakat di daerah ini juga cukup memiliki pengetahuan yang baik dalam pengelolaan ekowisata, sehingga masyarakat mampu mendorong dirinya sendiri untuk ikut berperan aktif.

Prabowo (2016), penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Pujon Kidul cukup memiliki kontribusi yang cukup baik dan telah disosialisasikan cukup baik oleh Kepala Desanya. Partisipasi masyarakat di Desa Pujon Kidul sudah terlibat dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur wisata, edukasi pertanian, peternakan, pembuatan makanan khas, pengelolaan *outbound*, pembuatan paket wisata, penyediaan *homestay*, dan penyediaan pemandu lokal, dan menerapkan *sapta pesona*. Hal tersebut dapat disebutkan bahwa partisipasi masyarakatnya sudah cukup maksimal terhadap seluruh aspek kegiatan pengembangan desa wisata. Selain itu, hal ini juga terjadi dikarenakan adanya kepedulian dari beberapa masyarakatnya, sosialisasi yang baik dari Kepala Desa dan adanya komunikasi yang terjalin baik diantara pihak-pihak yang terkait.

Cahya (2016), penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan atraksi wisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya banyak usaha dari masyarakat dalam merintis Desa Kampunganyar sehingga menjadi terkenal. Partisipasi masyarakat di Desa Kampunganyar dapat terlaksana dengan baik, meskipun terjadi banyak kendala yang dialami masyarakat seperti kurang diterimanya pengembangan tersebut oleh sebagian masyarakat, dan yang akhirnya menimbulkan perpecahan antara kelompok masyarakat. Dari hal inilah, akhirnya atraksi wisata air terjun Kampunganyar dikelola oleh BUMDES. Bentuk partisipasi masyarakat juga dikarenakan adanya antusias untuk menjadikan desanya lebih terkenal dengan mengelolah potensi yang dimiliki, sehingga mampu menghasilkan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Munaworoh (2017), penelitian yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakatnya cukup baik dan dikarenakan penelitian ini juga didasarkan pada pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat untuk mempertajam dan memantapkan citra pariwisata dengan peningkatan pemasaran melalui media sosial dan aksesibilitas. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian. Keterlibatan yang baik dari masyarakat juga

dikarenakan adanya kesempatan yang diberikan, tuntutan lingkungan, untuk kemajuan daerah, serta memanfaatkan dan mengoptimalkan untuk memperoleh manfaat yang baik dari adanya pengembangan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai perbandingan antara penelitian yang saat ini dengan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa, bentuk partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan, adanya beberapa faktor yang menjadi kendala untuk terlibat secara optimal dalam pengembangan pariwisata. Misalnya, tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah (awam), masyarakat yang rata-rata memiliki usia yang lanjut, kurangnya kesadaran atau motivasi diri untuk berubah, serta kurangnya dukungan dari Kepala Desa yang hendaknya menjadi sebagai koordinator masyarakat yang mampu memberikan sosialisasi dan arahan yang baik dan lebih bertanggung jawab untuk kemajuan daerahnya. Pada hasil dari beberapa penelitian terdahulu sebagian besar menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat sudah cukup baik dan optimal, dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dan sekaligus adanya sosialisasi yang baik dari koordinator masyarakat (khususnya Kepala Desa) untuk memanfaatkan kesempatan yang ada secara optimal demi memperbaiki seluruh aspek kehidupan masyarakat (aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di lapangan dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian mengenai analisis partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep masih kurang optimal jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang pada umumnya bentuk partisipasinya sudah cukup optimal dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Partisipasi masyarakat lokal di Pulau Gili Labak pada proses peningkatan peran atau partisipasi aktif dalam tahap perencanaan, implementasi, *monitoring* dan evaluasi masih dijalankan atau bertumpu pada Pokdarwis dan Disbudparpora, untuk selebihnya masyarakat masih lebih cenderung bersikap acuh tak acuh.
  - b. Partisipasi aktif masyarakat lokal untuk berkontribusi dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep ditunjukkan melalui adanya penyediaan kebutuhan wisatawan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat (warung makanan dan minuman, toilet, mushollah, tempat penginapan, dan sedikit atraksi wisata).

- c. Partisipasi pasif masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang masih banyak bertumpu pada atasan dalam melakukan kegiatan yang menyangkut tentang pengembangan pariwisata (kegiatan gotong-royong, penanaman terumbu karang, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas, dan pembuatan program atau perencanaan).
2. Terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong yang memicu masyarakat lokal untuk ikut atau tidak ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep diantaranya yaitu:
    - a. Faktor penghambat karena kualitas sumber daya manusianya yang masih rendah (rendahnya pengetahuan dan pengalaman, rendahnya tingkat pendidikan, dan faktor usia), serta endahnya motivasi dalam diri masyarakat untuk berubah.
    - b. Faktor penghambat karena kurangnya sosialisasi yang sifatnya berkelanjutan dari beberapa pihak, dan rendahnya dukungan dari Kepala Desa untuk mengkoordinasi masyarakatnya ikut terlibat dalam pengembangan, serta tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara pihak dinas dengan masyarakat, Pokdarwis dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat.
    - c. Faktor pendorong adanya motif dasar tertentu dari masyarakat untuk memperbaiki perekonomian, serta adanya harapan-harapan yang diinginkan dari masyarakat untuk menjadikan Pulau Gili Labak

menjadi pulau yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang layak bagi masyarakat, kondisi lingkungan yang tertata, dan harapan-harapan lainnya seperti pemenuhan sarana, prasarana dan infrastruktur untuk menunjang kebutuhan masyarakat lokal sekaligus wisatawan.

## **B. Saran**

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan berdasarkan fokus permasalahan yang dibuat, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Kepala Desa Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep sebagai tokoh masyarakat yang bertanggung jawab atas Desa dan seluruh lapisan masyarakat berupa:
  - a. Memberikan pengarahan (sosialisasi) yang optimal dan bertanggung jawab kepada seluruh lapisan masyarakat lokal untuk dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam berkontribusi pada pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan kerja sama atau menjalin hubungan yang baik melalui Pokdarwis untuk dapat saling menggerakkan masyarakat agar berperan aktif. Sosialisasi ini juga dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Disbudparpora untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan yang khusus terkait pengembangan.
  - b. Memberikan pelatihan terkait pengembangan kualitas SDM untuk melakukan pengasahan keahlian kepada seluruh lapisan masyarakat. Pelatihan tersebut dapat dilakukan secara bertahap melalui kerja sama

dengan Pokdarwis untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk lebih berpikir kreatif dan rasional terhadap pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak. Pelatihan yang dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan cara membentuk suatu kelompok masyarakat untuk membuat souvenir (cinderamata), dan melatih masyarakat untuk mampu menjadi pelaku utama dalam kegiatan pariwisata seperti membuat paket wisata.

- c. Sebagai Kepala Desa hendaknya dapat berperan lebih aktif lagi terkait adanya pengembangan pariwisata di daerahnya. Diharapkan juga mampu mengelolah PAD lebih baik dan bertanggung jawab yang dihasilkan dari penjualan tiket. PAD tersebut dapat dikelola secara adil untuk kebutuhan masyarakat setempat dan juga untuk kebutuhan terkait pemeliharaan dan pengembangan di Pulau Gili Labak.
2. Saran untuk Pokdarwis Pulau Gili Labak sebagai kelompok yang cukup sadar wisata dan dipercayakan untuk mengkoordinasi serta menjadi penggerak bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan berupa:
    - a. Pengoptimalan dan melakukan evaluasi rutin untuk setiap bidang-bidang yang terkait dalam pengembangan khususnya dalam hal memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan bagi seluruh wisatawan yang berkunjung. Hal ini dapat dilakukan melalui musyawarah kecil hingga ke musyawarah besar dengan seluruh pihak-pihak yang tergabung dalam keanggotaan untuk saling memperbaiki jika belum melaksanakan tanggung jawabnya secara baik.

- b. Terus meningkatkan dalam pembuatan program atau rencana strategis yang terkait pengembangan pariwisata di Pulau Gili Labak. Hal ini misalnya dalam melakukan menjaga dan memelihara kelestarian dari potensi yang dimiliki, mengaktifkan terus untuk kegiatan bersih-bersih yang dilakukan setiap 2 kali seminggu untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan objek wisata. Selain dalam pemeliharaan, Pokdarwis juga membuat rencana dalam hal mempromosikan Pulau Gili Labak melalui beberapa media seperti media elektronik dan media cetak supaya hal tersebut bukan malah dilakukan oleh pihak luar (orang-orang diluar Pulau Gili Labak).
  - c. Diusahakan untuk selalu *standby* pada bidang masing-masing, khususnya dalam hal menjaga keamanan. Hal ini dikarenakan, Pulau Gili Labak merupakan pulau kecil yang cukup terpencil yang sangat rawan untuk terjadi tindakan yang tidak baik dari beberapa pengunjung.
3. Saran untuk masyarakat lokal di Pulau Gili Labak yang dapat mewujudkan keinginan untuk meningkatkan hasil perekonomian melalui adanya pengembangan pariwisata berupa:
    - a. Lebih meningkatkan kesadaran diri untuk ikut peduli dalam pengembangan pariwisata yang nantinya dapat memberikan manfaat secara ekonomi.

- b. Harus mampu memotivasi diri sendiri untuk lebih berpikir rasional terhadap perubahan yang terjadi, jangan hanya bertumpu atau pasrah dengan keadaan.
  - c. Belajar untuk dapat melihat peluang terkait perubahan yang terjadi, karena jika hal ini terjadi pada masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan muncul dalam diri masyarakat untuk merubah nasib mereka.
  - d. Hendaknya tetap berusaha untuk terlibat aktif sekalipun tidak mengerti atau sangat awam terhadap pengembangan pariwisata. Hal ini dikarenakan, jika dilihat dari berbagai penawaran yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, masyarakat malah tidak merespon dan selalu takut untuk melangkah. Maka dari itu, kesadaran dan motivasi dalam diri masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk diasah dan ditingkatkan.
4. Saran untuk lingkup akademis yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama yaitu, karena adanya keterbatasan dan masih banyak kekurangan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang, diharapkan dan disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian yang lebih baik dan mendalam terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Adi, Isbandi Rukminto.2007.*Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran menuju Penerapan*.Depok: FISIP UI Press.
- Adisasmita, Rahardjo.2006.*Membangun Desa Partisipatif*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arjana, I Gusti Bagus.2016.*Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*.Jakarta: Rajawali Pers.
- B.Miles, Matthew dan A. Michael Huberman.1992.*Analisis Data Kualitatif*.Jakarta: UI Press.
- Conyers, Diana.1991.*Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, Imam.2013.*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti.2012.*Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Herdiansyah, Haris.2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*.Jakarta: Salemba Humanika.
- Minderop, Albertine.2010.*Psikologi Sastra Karya Sastra, Metode, Teori, dan Contoh Kasus*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muljadi, A.J dan Andri Warman.2016.*Kepariwisata dan Perjalanan*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J.2012.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mowforth, Martin dan Ian Maunt,2000.*Pariwisata yang Berkelanjutan Pariwisata Baru di Dunia Ketiga*.Jakarta: Bagian Proyek Pengembangan Literatur Pariwisata Tahun Anggaran 2000.
- Pendit, Nyoman S.1986.*Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*.Jakarta: Pradnya Paramita.

Pitana, I Gede dan I Ketut Surya Diarta.2009.*Pengantar Ilmu Pariwisata*.Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Poerwadarminta.2007.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.

Sumarto, Hertifa.2004.*Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sunaryo, Bambang.2013.*Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta: Gava Media.

Suswanto, Gamal.2004.*Dasar-dasar Pariwisata*.Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Wardiyanta, M.Hum.2006.*Metode Penelitian Pariwisata*.Yogyakarta: CV Andi Offset.

Yoeti, Oka A.1997.*Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*.Jakarta: Pradnya Paramita.

Yoeti, Oka A.2008.*Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi, dan Implementasi*.Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

### **Jurnal**

Byrd, Erick T.2007.Stakeholders in Sustainable Tourism Development and their Roles: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development.*Journal of Tourism Review*, Vol. 62: 6-13.

Cahya, Andri T.2016.Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Atraksi Wisata Air Terjun Kampunganyar, Kabupaten Banyuwangi.*Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 42: 156-161.

Jamal, Tazim B. dan Donald Getz.1995.Collaboration Theory and Community Tourism Planning.*Annals of Tourism Research*, Vol. 22: 186-204.

Munaworoh, Rina.2017.*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Gunung Merbabu Dusun Suwanting Banyuroto Sawangan Magelang*.SKRIPSI.Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Nawawi, Ahmad.2013.Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis.*Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 5: 103-109.

Prabowo, Septiofera Eresus.2016.Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata.*Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 33: 18-24.

- Prasetia, Andita Ratih.2015.*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekowisata Berbasis Pantai*.SKRIPSI.Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Rasoolimanesh, S Mostafa.2017.Urban Vs. Rural Destinations: Residents' Perceptions, Community Participation and Support for Tourism Development.*Journal of Tourism Management*, Vol. 60: 147=158.
- Sharpley, Richard.2014.Host Perceptions of Tourism: A Review of the Research.*Journal of Tourism Management*, Vol. 42: 37-49.
- Sinclair, Gaunette dan Maragh.2017.Demographic Analysis of Residents' Support for Tourism Development in Jamaica.*Journal of Destination Marketing & Management*, Vol. 6: 5-12.
- Tosun, Cevat.2000. Limits to Community Participation in the Tourism Development Process in Developing Countries..*Journal of Tourism Management*, Vol. 21: 613-633.
- Wang, Yasong, Robert E. Pfister, dan Duarte B. Morais.2006.Resident' Attitudes Toward Tourism Development: A Case Study of Washington, NC. *Proceedings of the 2006 Northeastern Recreation Research Symposium*, Vol. 14: 411-418.

### **Dokumen**

- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.2018. *Studi Kelayakan: Daya Dukung dan Kebutuhan Lahan untuk Pengembangan Pariwisata Pulau Gili Labak*.Sampang: PePRO Communication.
- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.2018. *Studi Kelayakan: Pengembangan Wisata Pulau Gili Labak - Sumenep*.Situbondo: CV. Qolbu Persada.

### **Internet**

- Media Center.2018.*Disparbudpora Benahi Fasilitas Pariwisata Dukung Visit Sumenep*, diakses pada tanggal 25 Januari 2018 dari (<http://sumenepkab.go.id/berita/baca/disparbudpora-benahi-fasilitas-pariwisata-dukung-visit-sumenep->).

News Madura.2017.*Visit Sumenep 2018: Pemkab harus Benahi Sarpras di Lokasi Wisata*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 dari (<http://newsmadura.com/sumenep/berita-sumenep/visit-sumenep-2018-pemkab-harus-benahi-sarpras-di-lokasi-wisata/>).

News Madura.2017.*Visit Sumenep 2018: Inilah Pemetaan Lokasi Wisata di Sumenep*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 dari (<http://newsmadura.com/sumenep/berita-sumenep/visit-sumenep-2018-inilah-pemetaan-lokasi-wisata-di-sumenep/>).

Portal Madura.2017.*Visit Sumenep Year 2018, Dinas PU PRKP dan Cipta Karya Penuhi Air Bersih di Gili Labak*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 dari (<https://portalmadura.com/visit-sumenep-year-2018-dinas-pu-prkp-dan-cipta-karya-penuhi-air-bersih-di-gili-labak-82869>).

Seputar Madura.2017.*Kunjungan Wisata Sumenep berada di Peringkat 5 se-Jatim*, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 dari (<http://seputarmadura.com/sumenep/berita-sumenep/kunjungan-wisata-sumenep-berada-di-peringkat-5-se-jatim/>).

Tanpa Nama.2016.*Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sumenep*, diakses pada tanggal 20 April 2018 dari ([https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi\\_277\\_2016.pdf](https://sipd.kemendagri.go.id/dokumen/uploads/visimisi_277_2016.pdf)).

Tanpa Nama.Tanpa Tahun.*Peta Jalur Pulau Gili Labak*, diakses pada tanggal 21 Maret 2018 dari ([https://www.google.co.id/search?tbm=isch&q=map+gili+labak+madura&chips=q:map+gili+labak+madura,online\\_chips:pulau+gili&sa=X&ved=0ahUKEwjh9KOEufzZAhVJPrwKHeA8A0QQ4IYILygl&biw=1024&bih=494&dpr=1#imgrc=\\_zm0TGKB8VfZoM:](https://www.google.co.id/search?tbm=isch&q=map+gili+labak+madura&chips=q:map+gili+labak+madura,online_chips:pulau+gili&sa=X&ved=0ahUKEwjh9KOEufzZAhVJPrwKHeA8A0QQ4IYILygl&biw=1024&bih=494&dpr=1#imgrc=_zm0TGKB8VfZoM:)).

## **Undang-Undang**

Republik Indonesia.2009.*Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.Jakarta: Sekretariat Negara.